



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Veteran No.139 Purwakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, 28 Pebruari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Hariman Budi Anggoro, ST.MT
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	6
1.5. Struktur Organisasi	8
1.6. Sistematika.....	20
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja.....	37
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.2. Realisasi Anggaran.....	70
Bab IV. P E N U T U P	80
LAMPIRAN	82



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

Purwakarta, Februari 2025
Pkt Inspektur

Dani Abdurrahman, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar Instansi Pemerintah melakukan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun Rencana yang didukung oleh Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik Nasional maupun Daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pada Perkembangannya, Amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan serta berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 9).
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta.

11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Setelah Penyederhanaan Birokrasi
Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* (lincah) dan dinamis yang didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN, telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
4. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) Cloud dan Gawai Administrasi Perizinan Online (GASPOL), untuk memproses perizinan yang belum diakomodir dalam OSS RBA.
5. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dan Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara.
6. Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
7. Keberadaan Kabupaten Purwakarta dengan Kota Jakarta, Bandung dan Cirebon menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai segitiga emas jalur investasi dan wisata.

8. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih terbuka lebar.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 adalah :

1. Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Belum Optimal

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta, sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

2. Pengelolaan Data dan Informasi yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, data merupakan aspek penting dalam urusan penanaman modal yang dapat memberikan dasar pengambilan keputusan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penanaman modal belum dapat dimanfaatkan secara lengkap dan akurat.

3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum merata pada lokasi tujuan investasi terutama pada kawasan-kawasan industri tertentu.

4. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha perlu didorong perencanaan percepatan perizinan berusaha secara pentahelix untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

6. Perkembangan politik nasional dan internasional dapat berimbas terhadap penurunan realisasi investasi dikarenakan banyak investor yang menunggu dan selektif dalam menanamkan modalnya.

7. Perlambatan perekonomian dunia dan risiko investasi yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi di berbagai negara termasuk di Indonesia sehingga banyak investor belum dapat mengambil keputusan berinvestasi.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

DPMPTSP mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

- pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. Pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:
 - 1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
 - 2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
 - 3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal :
 - 1. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
 - 2. Penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
 - 3. Kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan

4. Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.
- c. Pelayanan Penanaman Modal
 1. Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; dan
 3. Pengawasan penanaman modal.
- e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP; dan
- g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP;
7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan dinas; dan
8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan

data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja DPMPTSP dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
7. Melaksanakan promosi penanaman modal untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya;
8. Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan

yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;

9. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha/masyarakat;
10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai bahan informasi dan publikasi;
11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
12. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPTSP setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
14. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
15. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
16. Membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan administrasi barang milik daerah;
5. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan administrasi umum;
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
9. Penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas pelayanan pada mpp dan/atau gerai pelayanan publik Teras Kecamatan dan/atau Pojok Desa;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang milik daerah;

9. Melaksanakan urusan umum yang meliputi kerumahtanggaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan kearsipan, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan informasi daerah pembantu, berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
10. Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan akuntabel;
11. Menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
13. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

15. Membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
3. Pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;
4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
5. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dengan uraian tugas:

1. Menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan administrasi keuangan berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagai bahan penetapan;
7. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengesahan;
8. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
9. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
10. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;

11. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Membuat laporan kinerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

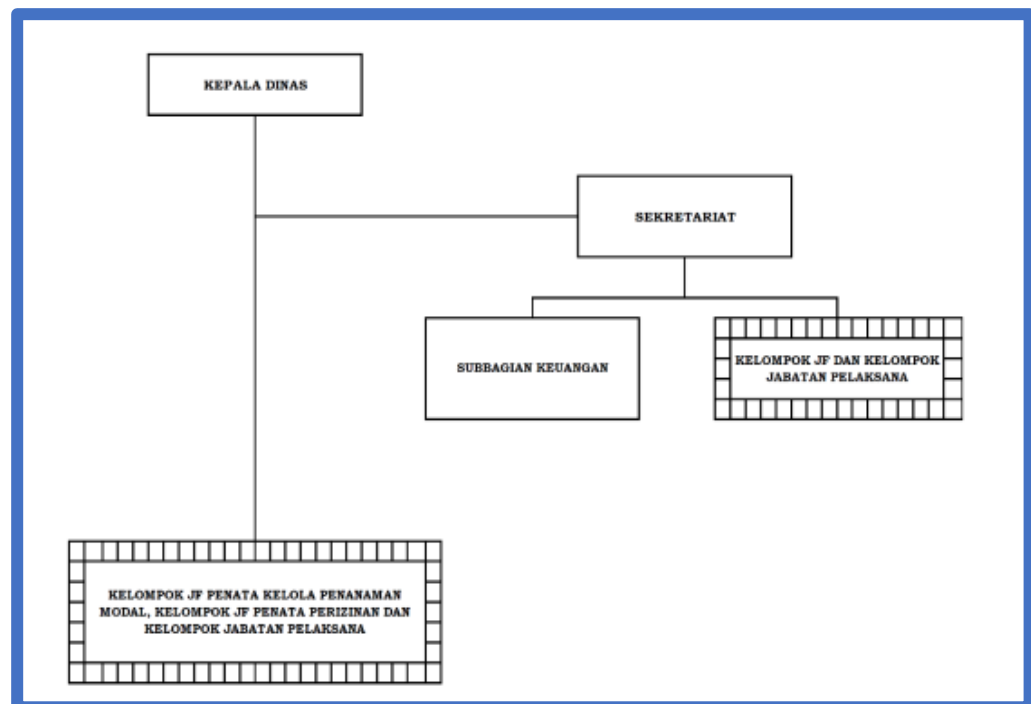
- a. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal
Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok JF Penata Perizinan
Kelompok JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana
Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara fungsional sesuai dengan literatur

jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara fungsional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi



Sumber : DPMPTSP

1.6. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dibuat dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic*

issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, berisi Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar *inline* dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan serta penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana strategis ini memuat visi dan misi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

VISI:

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

Misi 1:

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3:

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4:

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan adalah merupakan sesuatu

yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga dan Kelima yaitu:

Misi Ketiga

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi:

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berkualitas.

Indikator Tujuan:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Misi Kelima

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Strategi:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

Indikator Tujuan:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat.

2.1.1. Sasaran Strategis

Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa program yang akan dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam urusan penanaman modal diharapkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan **“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian”** sebagaimana termuat dalam dokumen RPD Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan sasaran pembangunan daerah, visi-misi serta tujuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengampu tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target
Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. Triliun	6,73	7,2	7,7
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	Predikat	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.1.2. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Perumusan Sasaran Program harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut telah dijabarkan dalam *Cascading*, *Crosscutting* serta Peta Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang menjadi strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam upaya pencapaian tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan langsung dengan program unit organisasi dibawah Eselon II yang mendukung Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja
Tahun 2024-2026

No	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor					
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	5,6	5,8	6,0
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	6,73	7,20	7,70
3.	Jumlah investor berskala nasional	PMDN/PMA	730	803	884
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase	28,5	29,0	29,5

Program Promosi Penanaman Modal					
Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal					
5.	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2	2	2
6.	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	Triliun	7,4	7,9	8,4
Program Pelayanan Penanaman Modal					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal					
7.	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	Persen	18,5	19,0	19,5
8.	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	Persen	94,58	95,58	96,58
9.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Poin	92,5	93,00	93,50
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal					
10.	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	7,14	8,70	8,70
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
Meningkatnya Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan					
11.	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
12.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Untuk mewujudkan sasaran kinerja maka dibuat rencana aksi tahunan sebagai langkah awal perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6,73 T		1.127.763.509				
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal				110.116.509				
Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		40.116.509				

Subkegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal	20.000.000		√		
Subkegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Kegiatan Usaha	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	20.116.509				√
Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen		70.000.000				
Subkegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Naskah Akademis RUPM 2025-2030	50.000.000				√
Subkegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	20.000.000		√	√	√
Program : Promosi Penanaman Modal				177.500.000				
Kegiatan :Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen						
Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Promotion 2. Kosmik /Videografi Promosi Investasi 3. UMK Naik Kelas/Kemitraan 4. Anvesta	127.500.000		√		√

Subkegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Tim Peningkatan Investasi Daerah	50.000.000		√		
Program : Pelayanan Penanaman Modal				135.000.000				
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan		135.000.000				
Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan Usaha	Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat	0				
Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	85.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	20.000.000	√	√	√	√

Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000	√	√	√	√
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				585.147.000				
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		585.147.000				
Subkegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	87.771.000		√		
Subkegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	351 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)	321.832.000		√	√	

Subkegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	175.544.000	√	√	√	√
Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				120.000.000				
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		120.000.000				
Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. SILAPAK PRESTASI 3. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	120.000.000		√	√	
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat	A, Sangat Baik		13.108.837.852				

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen		43.334.000				
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (DPA, RKA, DPPA, Perubahan RKA, Renja 2025, Perubahan Renja 2024)	15.017.000	√	√	√	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen LKIP	8.141.000	√			
Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan, Laporan Evaluasi PTSP dan PPB)	20.176.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan		7.512.754.415				
Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.492.759.615	√	√	√	√
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.993.900	√			

Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.900	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		20.000.000				
Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		207.500.000				
Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65.000.000		√		
Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	85 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	142.500.000	√	√	√	√
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan		696.129.303				

Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.000.000	√			
Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.500.000	√			
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270.625.303	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	125.004.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Paket	5 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan koordinasi dan konsultasi	170.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	25.000.000	√			
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan		851.000.000				
Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	10 Paket Mebel yang Disediakan	51.000.000			√	

Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	3 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk DPMPSTP, MPP dan Teras	800.000.000			√	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		3.053.160.134				
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	600.000.070	√	√	√	√
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.443.160.064	√	√	√	√
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan		724.960.000				
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	110.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Laporan Mebel yang Dipelihara	20.000.000	√	√	√	√
Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit	Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95.000.000	√	√	√	√

Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	√			
Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.960.000			√	

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) sesuai Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 adalah dokumen kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Triliun)	8 Triliun
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan	Capaian SAKIP	Predikat	AA

	Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik
--	---	----------------------------	----------	-------------

Dikarenakan Perjanjian kinerja berisikan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, serta untuk mewujudkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya, penetapan sasaran kinerja urusan penanaman modal dengan target kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditetapkan sebesar 8 Triliun, hal ini berdasarkan kepada analisa pencapaian riil tahun sebelumnya. Jika melihat capaian tahun 2023 sebesar 14,88 T, maka penetapan target tidak mungkin mengacu kepada hasil capaian tersebut dikarenakan pencapaian ini setelah dianalisa terdapat realisasi Proyek Strategis Nasional yang merupakan data anomali dari data investasi PMA dan PMDN. Realisasi Proyek Strategis Nasional (Proyek Kereta Api Cepat, Tol Japek II dan Solar Cell) mencapai Rp. 6,68 T, sehingga ditetapkan target sebesar Rp. 8 T.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Persentase)	5,6	110.116.509
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliun)	6,73	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	

		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	28,5	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2	177.500.000
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	7,4	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	18,5	135.000.000
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	94,58	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	92,5	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14%	585.147.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100%	120.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	13.108.837.852
Jumlah				14.236.601.361

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LKjIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2024 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari data dan sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder seperti data realisasi investasi merupakan data integral dengan Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini DPMPTSP melakukan pengukuran dan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Output Tim Kerja yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. 8,00 (Triliun)	Rp. 8,13 (Triliun)	101,62	Melampaui	Data Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	AA	Predikat	--	--	--
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024		Predikat Kinerja Tahun 2024	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	20	21
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.0.00.0.00.01.000.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Rp. (Triliun)	8	14.328.811.989	1,68	2.676.076.374	3,1	6.350.358.801	6,88	10.335.702.100	8,13	13.510.558.134	8,13	13.510.558.134	101,63%	94,29%	97,96%	SANGAT TINGGI
	2,18	BIDANG PENANAMAN MODAL				14.328.811.989		2.676.076.374		6.350.358.801		10.335.702.100		13.510.558.134		13.510.558.134		94,29%		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	02.18.01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			13.286.778.630		2.676.076.374		6.165.568.171		9.778.758.740		12.567.703.674		12.567.703.674		94,59%		
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		AA		AA		AA		AA		AA		125,00%		125,00%	MELAMPAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	02.18.02		Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal			146.333.259		0		102.911.250		115.975.200		124.074.000		124.074.000	-128,32%	84,79%	-21,77%	SANGAT RENDAH
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	5,6		-48,89		-65,47		-55,41		-45,32		-45,32		-809,29%			SANGAT RENDAH
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Triliun)	6,73		1,68		3,1		6,88		8,13		8,13		120,80%			MELAMPAUI
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	730		110		240		342		413		413		56,58%			SANGAT RENDAH
			Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	28,5		10		20		75		33,81		33,81		118,63%			MELAMPAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	02.18.03		Program : Promosi Penanaman Modal			32.696.000		0		1.452.000		1.452.000		29.539.600		29.539.600	284,46%	90,35%	187,40%	MELAMPAUI
			Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2		0		0		2		2		2		100,00%			SANGAT TINGGI
			Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	7,4		6,3		12		18,1		34,7		34,7		468,92%			MELAMPAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	02.18.04		Program : Pelayanan Penanaman Modal			135.000.000		0		15.177.380		41.706.830		119.257.530		119.257.530	131,12%	88,34%	109,73%	MELAMPAUI
			Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	18,5		9		12		15		34,5		34,5		186,49%			TINGGI
			Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	94,58		100		100		100		97		97		102,56%			MELAMPAUI
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92,5		97,96		96,05		97,38		96,5		96,5		104,32%			MELAMPAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	02.18.05		Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			585.147.000		0		13.443.000		271.343.730		527.593.730		527.593.730	112,04%	90,16%	101,10%	MELAMPAUI
			Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	7,14		3		5		6		8		8		112,04%			MELAMPAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	02.18.06		Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			142.857.100		0		51.807.000		126.465.600		142.389.600		142.389.600	100,00%	99,67%	99,84%	SANGAT TINGGI
			Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100		25		50		75		100		100		100,00%			SANGAT TINGGI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta melakukan pengukuran kinerja secara periodik untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara triwulan/semester/tahunan. Tim Kerja Perencanaan adalah pihak yang melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran hingga pelaporan secara berkala. Pengumpulan data dilaksanakan berjenjang dari pelaksana, Ketua Tim untuk kemudian dilaksanakan penilaian oleh penilai kinerja. Ketua Tim bertugas untuk mengumpulkan data kinerja yang disimpan di layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh *Google*, untuk selanjutnya dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi penilaian kinerja yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (e-Kinerja). Data kinerja tersebut kemudian dianalisis ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan. Tujuan pelaksanaan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada setiap sasaran strategis adalah memaparkan realisasi indikator kinerja utama, problematika dan kendala yang dihadapi serta upaya pemulihan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Lebih lanjut dalam pencapaian tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut, pengukuran kenaikan atau penurunan capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023, data tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	6,25	14,88	238%	8,00	8,13	101,62
2	Capaian SAKIP	A	AA	125	AA	N/A	N/A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	91,06	110,33	92,5	96,5	104,32

Sumber : DPMPTSP

Tahun 2024 terdapat penurunan persentase capaian investasi, berdasarkan hasil analisa data realisasi investasi tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat data realisasi investasi dari beberapa perusahaan yang masuk dalam Program Prioritas Nasional (PSN), sebesar Rp. 6.684.217.118.048 atau 45% dari capaian tahun 2023 sebesar Rp. 14.883.013.766.680, rincian PSN tersebut yaitu :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. PT. Kereta Cepat Indonesia China | Rp. 3.392.276.218.255 |
| 2. PT. PJB Masdar Solar Energi | Rp. 592.832.599.793 |
| 3. PT. Jasa Marga Japek Selatan | Rp. 2.699.108.300.000 |
| Jumlah | Rp. 6.684.217.118.048 |

Sedangkan perbandingan capaian urusan penanaman modal dengan indikator peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN maka hasil pencapaian kinerja pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Fasilitas Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	5	6	6
I.	Target Nilai Investasi (RPJMD)	60.000.000.000.000	65.000.000.000.000	70.000.000.000.000	75.000.000.000.000	93.320.000.000.000
II.	Realisasi Investasi					
	PMA (Rp)	60.640.107.962.208	62.838.499.733.628	68.542.559.443.077	76.140.613.609.757	79.448.453.871.306
	PMDN (Rp)	9.126.934.600.000	11.658.718.600.000	14.292.434.200.000	21.577.393.800.000	26.399.249.461.877
	Jumlah	69.767.042.562.208	74.497.218.333.628	82.834.993.643.077	97.718.007.409.757	105.847.703.333.183
	% Capaian RPJMD	116,28%	114,61%	118,34%	130,29%	113,42%
	Laju Pertumbuhan (%)	11,12%	6,78%	11,19%	17,97%	8,32%
	PMA (Rp)	3.690.863.702.733	2.198.391.771.420	5.704.059.709.449	7.598.054.166.680	3.307.840.261.549
	PMDN (Rp)	3.291.093.200.000	2.531.784.000.000	2.633.715.600.000	7.284.959.600.000	4.821.855.661.877
	Realisasi Tahun n	6.981.956.902.733	4.730.175.771.420	8.337.775.309.449	14.883.013.766.680	8.129.695.923.426
	Target RPJMD	N/A	N/A	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	6.730.000.000.000
	%Capaian			166,76%	297,66%	120,80%
III.	Jumlah Perusahaan					
	PMA	124	113	497	825	92
	PMDN	62	86	605	1.540	201
	Jumlah	186	199	1.102	2.365	293
IV.	Jumlah Tenaga Kerja					
	PMA (Orang)	3.843	2.111	15.013	5.586	80
	PMDN (Orang)	398	1.211	5.508	2.860	10.175
	Jumlah	4.241	3.322	20.521	8.446	10.255

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Target Akhir RPD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	8,13	7,70	105,19
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capaian SAKIP	N/A	A	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, capaian IKU kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah berhasil mencapai target akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi dan Instansi Sejenis

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi adalah membandingkan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional dan Provinsi. Data perbandingan yang dapat disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dengan standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Perbandingan Realisasi Investasi di Jawa Barat

REALISASI INVESTASI PMA, PMDN, DAN TOTAL PMA & PMDN DI JAWA BARAT
MENURUT KABUPATEN/KOTA, PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024

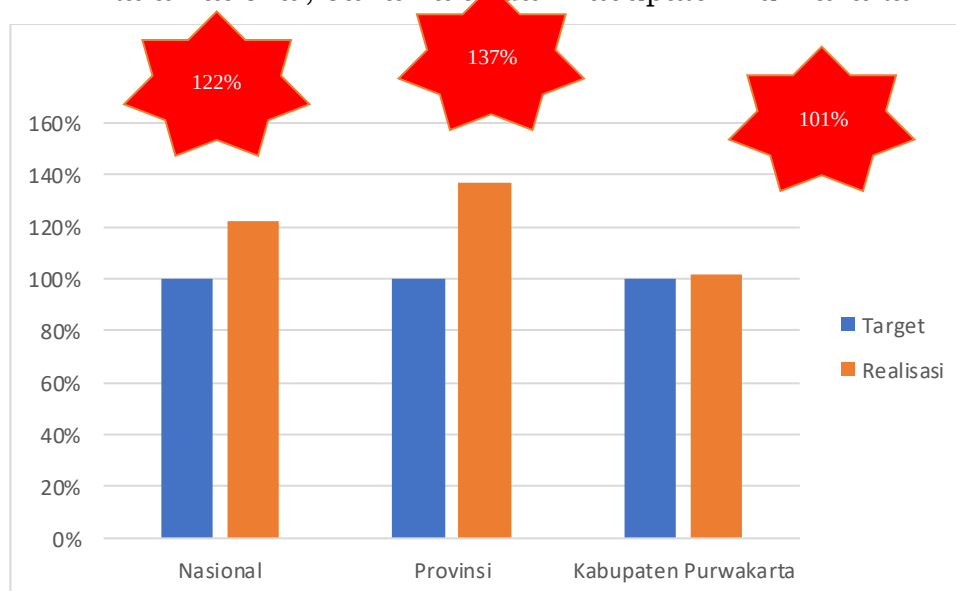
Total Realisasi PMA & PMDN				
Peringkat	KAB./KOTA	Jumlah LKPM	Jumlah Investasi (Rp.)	Rasio (%)
1	Kab Bekasi	31.026	71.833.362.087.052	28,60
2	Kab Karawang	9.652	68.547.701.341.355	27,29
3	Kab Bogor	19.781	22.907.559.426.827	9,12
4	Kota Bekasi	20.912	13.708.107.364.170	5,46
5	Kota Bandung	20.060	10.790.883.418.442	4,30
6	Kab Subang	2.219	9.765.851.511.049	3,89
7	Kab Bandung	7.791	8.982.194.802.741	3,58
8	Kab Purwakarta	3.181	8.129.695.923.426	3,24
9	Kota Depok	8.757	5.506.652.894.253	2,19
10	Kab Sukabumi	2.722	4.068.425.129.607	1,62

11	Kab Bandung Barat	3.394	3.898.921.956.582	1,55
12	Kab Sumedang	1.913	3.796.009.862.947	1,51
13	Kab Majalengka	1.553	3.595.729.858.199	1,43
14	Kab Cirebon	5.472	3.116.260.557.562	1,24
15	Kab Cianjur	1.838	2.830.542.931.119	1,13
16	Kab Garut	2.407	2.393.361.336.788	0,95
17	Kota Bogor	4.960	1.975.787.979.023	0,79
18	Kab Indramayu	1.419	1.512.222.543.960	0,60
19	Kota Cimahi	2.434	1.002.950.960.341	0,40
20	Kota Cirebon	2.552	983.290.301.701	0,39
21	Kab Kuningan	458	493.309.824.806	0,20
22	Kota Tasikmalaya	1.419	428.041.375.235	0,17
23	Kab. Pangandaran	488	249.924.709.692	0,10
24	Kab Tasikmalaya	625	228.279.756.931	0,09
25	Kota Sukabumi	916	169.102.777.133	0,07
26	Kab Ciamis	422	132.281.187.053	0,05
27	Kota Banjar	337	90.596.058.667	0,04

Sumber : Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Grafik. 1.1

Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi Tahun 2024
Antara Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta



Sumber : Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024, BKPM RI.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dengan realisasi investasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024. Target Investasi Nasional sebesar Rp. 1.650 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1.714 Triliun, sedangkan Target Investasi Provinsi sebesar Rp. 183 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 251,14 T. Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 0,47% bagi realisasi investasi nasional dan sebesar 3,2% bagi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat.

Hasil capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2024 secara keseluruhan telah melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil tersebut dapat dicapai dengan adanya komitmen dari Pimpinan dan jajaran pegawai di DPMPTSP yang dibuktikan dengan DPMPTSP menerima beberapa penghargaan di tahun 2024.

3.1.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Tingkat capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran bisa disebabkan oleh program atau kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja
DPMPTSP Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun)	8	8,13	101,62	Pengawasan yang intensif terhadap pelaku usaha memberikan dampak kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal sehingga data realisasi investasi dapat terekap dengan baik	Memberikan kemudahan dengan pengawasan dan monitoring kepada pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal berupa pendampingan implementasi OSS RBA dan Laporan LKPM : Penganugerahan pada ANVESTA, Forum Penyelesaian Masalah dan Pelaksanaan Bimtek Pelaku Usaha
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Capaian SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	AA Sangat Baik	N/A Sangat Baik	Unaudited 100	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap capaian indikator serta tindak lanjut hasil evaluasi	Pengawasan pimpinan dan pengukuran secara periodik

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan, akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara perencana, kasubag keuangan dan pelaksana kegiatan. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas dan efisiensi APBN bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih luas. Perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi dan koordinasi yang baik menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan demikian,

pengelolaan anggaran yang baik akan mampu menciptakan perekonomian yang stabil, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Langkah – langkah dalam mengukur efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Efisiensi Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga, pada pasal 39 Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pengukuran efisiensi dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dijabarkan dengan rumus berikut ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

2. Melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi.

3. Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.
4. Menganalisis dan membahas hasil perhitungan efisiensi dan tingkat efisiensi anggaran.

Dari langkah-langkah tersebut akan didapatkan data efisiensi anggaran sesuai pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Pengukuran Efektivitas Anggaran

No	Program	Mendukung Keluaran pada Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Capaian Keluaran	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	1.042.033.359	942.854.460	90,48	95,26	9,9	74,75	Cukup Efisien
2	Program Promosi Penanaman Modal								
3	Program Pelayanan Penanaman Modal								
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								

No	Program	Mendukung Keluaran pada Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Capaian Keluaran	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	13.286.778.630	12.567.669.674	94,59	100	9,9	74,75	Cukup Efisien

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh bahwa capaian keluaran kegiatan, efisiensi, dan nilai efisiensi masing-masing keluaran cukup identik. Nilai efisiensi terhadap program kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dengan nilai efisiensi 74,75 kategori “*cukup efisien*” begitu pula terhadap program kegiatan yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE dengan nilai efisiensi 74,75 kategori “*cukup efisien*” dengan realisasi anggaran masing-masing 90,48% dan 94,59%.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun)	97,96%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-45,32	Tidak menunjang
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	120,80	Menunjang
					Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	56,58	Menunjang
					Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	118,63	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	100,00	Menunjang
					Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	468,92	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja	186,49	Menunjang
					Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	102,56	Menunjang
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	104,32	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	112,04	Menunjang
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100,00	Menunjang

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Capaian SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik		IKM	100,00	Menunjang

berdasarkan tabel diatas, seluruh program menunjang tercapainya target sasaran kinerja yang pertama yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN dan Sasaran kedua Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE dengan deskripsi aspek penunjang sebagai berikut:

Analisis tingkat capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan penanaman modal dan urusan penunjang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran:

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial) ketersediaan informasi yang jelas, akurat tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta, kapasitas pelaku usaha dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem Informasi serta kapasitas pelaporan penanaman modal yang dapat menunjang kepatuhan pelaku usaha.

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan

dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi yaitu;

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1) Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bertujuan untuk menganalisis kebijakan apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak/retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya. Pada Tahun 2024 telah diundangkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta Kajian Akademis Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Permasalahan :

- Belum diundangkannya Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dikarenakan terkendala waktu pembahasan di legislatif, sehingga pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan daerah.

Solusi:

- Telah dibuat Naskah Akademis dan Draft Raperda Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pemberian kemudahan hanya untuk perizinan berusaha berdasarkan aturan NSPK Kementerian.

- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta yang akan ditransformasikan dalam bentuk informasi digital pada laman *website* (<https://investasi.purwakartakab.go.id>), serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2024 data peta potensi telah mengalami penambahan data peta untuk memudahkan investor mengakses informasi penanaman modal.

Permasalahan :

- Peta potensi digital belum dapat terakses maksimal oleh calon investor

Solusi:

- Telah dibuat proyek investasi atau *Investment Project Ready To Offer* untuk menjadi bahan promosi ke investor.

- 3) Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis Risiko merupakan kegiatan dalam pemberian rekomendasi/saran teknis kepada pimpinan terkait kebijakan sektor usaha yang terdampak dari kebijakan pemerintah daerah.

Permasalahan :

- Adanya disharmoni peraturan terkait investasi di lahan LP2B.

Solusi:

- Telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peraturan terkait Kebijakan tata ruang, pemanfaatan lahan sawah dan rekomendasi regulasinya.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Permasalahan :

- Penyusunan strategi promosi belum pentahelix.

Solusi:

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Investasi Daerah, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama dalam penguatan *image* Kabupaten Purwakarta sebagai tujuan investasi.

2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,

Permasalahan :

- Anggaran promosi investasi dengan cara melaksanakan pameran belum terpenuhi.

Solusi:

- Pada Tahun 2024 dilaksanakan promosi dengan mengikuti ajang *Investment Award* untuk mempromosikan IPRO dan dalam upaya peningkatan profil kawasan industri menjadi lebih berkembang telah dibuat video profil investasi untuk dilakukan promosi melalui media sosial dengan meningkatkan *engagement* media sosial.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

- ### **1) Penyediaan Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.**

Permasalahan :

- Implementasi Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum maksimal.

Solusi:

- a. Dilaksanakan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara dan Teras Madukara yang terdapat pada 5 (lima) kecamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Selain itu dilaksanakan pelayanan sampai tingkat desa yang diutamakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tahun 2024 telah dilaksanakan Gebyar NIB di semua kecamatan untuk para pelaku UMKM agar semakin mudah mengakses sumber pembiayaan baik perbankan maupun non bank. Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM seperti sertifikat halal dan PIRT. Selama tahun 2024 telah terbit sebanyak 39.862 NIB dari target 19.582 NIB. Salah satu aspek penting NIB adalah dapat selaras dengan upaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dengan cara meningkatkan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar usahanya dapat dipercaya oleh perbankan dan mitra bisnis. Tugas pemerintah adalah menciptakan atmosfernya serta menciptakan ekosistemnya.
- b. Mendorong pelaksanaan percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Hasil survey kepuasan masyarakat memberikan indeks kepuasan sebesar 96,5 dengan predikat sangat baik.

2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Permasalahan :

- Implementasi OSS belum maksimal

Solusi:

- Dilaksanakan koordinasi terjadwal serta pembahasan persetujuan perizinan berusaha oleh Tim Penataan Ruang yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah.

3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan.

Permasalahan :

- Pelaku usaha belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan proses perizinan berusaha melalui OSS RBA dan Pengaduan Masyarakat

Solusi:

- Dibuat tenan Klik Penanaman Modal dan Pengaduan Masyarakat di MPP Bale Madukara. kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung oleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

Permasalahan :

- Pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan permasalahan penanaman modalnya karena keterbatasan waktu dan akses.

Solusi:

- Forum Penyelesaian Masalah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya beberapa permasalahan penanaman modal. Berdasarkan hasil forum penyelesaian masalah terselesaikan masalah penanaman modal sebanyak 85 kegiatan usaha.

2) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha.

Permasalahan :

- Pelaku usaha belum mampu melaksanakan pelaporan kegiatan penanaman modal dan implementasi perizinan berusaha.

Solusi:

- Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaporan kegiatan penanaman modal saat ini dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi yaitu OSS RBA, SIMBG, SiCantik dan Gaspol, karenanya diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan Sistim secara baik dan benar. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara berkala. LKPM membantu pemerintah dalam memonitor perkembangan investasi, realisasi proyek, serta kendala yang dihadapi oleh investor di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tata cara penyusunan LKPM menjadi sangat penting bagi pelaku usaha. Bimbingan Teknis ini meliputi pelatihan proses perizinan berusaha dan penyusunan LKPM yang bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada pelaku usaha, agar dapat

mengoperasikan sistem perizinan dan menyusun laporan penanaman modal dengan benar, sesuai regulasi terbaru, serta menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kesalahan administrasi penanaman modal. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam melaporkan kegiatan usahanya. Tahun 2024 telah dilaksanakan Bimtek sebanyak 3 kali dengan total pelaku usaha yang mengikuti sebanyak 420.

3) Pengawasan Penanaman Modal

Permasalahan :

- Pelaku usaha tidak patuh terhadap peraturan perundangan

Solusi:

- Pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman modal melalui Pengawasan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistim OSS RBA sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor. Pengawasan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas realisasi penanaman modal dan implementasi perizinan berusaha, kesesuaian antara jenis perizinan berusaha yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan, serta peraturan perundangan dari perizinan berusaha yang dimiliki oleh suatu Perusahaan. Pengawasan mempunyai fungsi utama dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal, termasuk didalamnya kepatuhan terhadap pelaporan

penanaman modal (LKPM). Pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan tiga jenis kegiatan:

1. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan.
2. Pelaksanaan inspeksi lapangan.
3. Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Permasalahan :

- Data dan Informasi penanaman modal belum tersaji maksimal.

Solusi:

Peningkatan kapasitas server di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mendukung terlaksananya pelayanan penanaman modal.

- 1) Penyusunan Pelaporan Realisasi Investasi dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan penanaman modal.
- 2) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 3) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan data dan informasi untuk mendukung terhadap Penilaian penyelenggaraan PTSP, PPB, Evaluasi pelayanan publik terkait kepatuhan pelayanan dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP.
- 4) Pengembangan Sistem Informasi pendukung OSS RBA yaitu Perizinan Gawai Administrasi Perizinan *Online* (GASPOL) dan Pengembangan *Website*.

Info Grafis Capaian Kinerja Investasi Tahun 2024

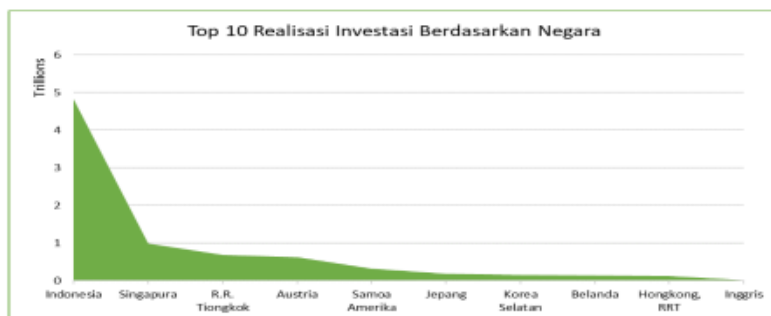
Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Triwulan I - IV 2024



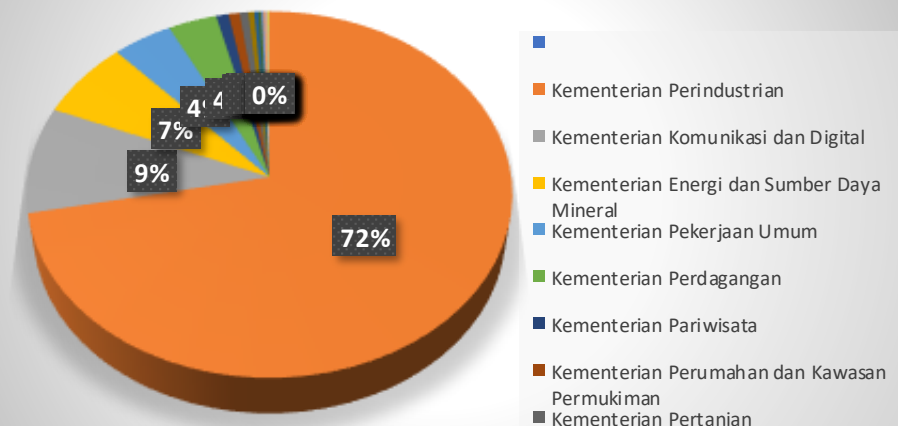
Realisasi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha Triwulan I – IV 2024



Top 10 Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Triwulan I – IV 2024



Jumlah Minat Investasi Per Sektor Tahun 2024



Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

1. Capaian SAKIP

Permasalahan

Pelaksanaan sistem SAKIP belum maksimal

Solusi

Penegakan akuntabilitas kinerja berbasis sistem (e-Kinerja). Capaian SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif sebesar 91,25 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Terdapat penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 poin dari tahun 2022 dengan nilai 91,40 Adapun rincian perolehan nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan masing masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	27,00
Pengukuran kinerja	28,50
Pelaporan Kinerja	15,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,75

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pengelolaan kinerja, sistem penganggaran dan evaluasi kinerja, dalam pelaksanaannya harus selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap pelaksanaan pengelolaan kinerja dan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2024 dengan upaya penegakan akuntabilitas yang telah dilaksanakan, diharapkan masih dapat dipertahankan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Permasalahan :

Pelayanan publik tidak terukur. Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Solusi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

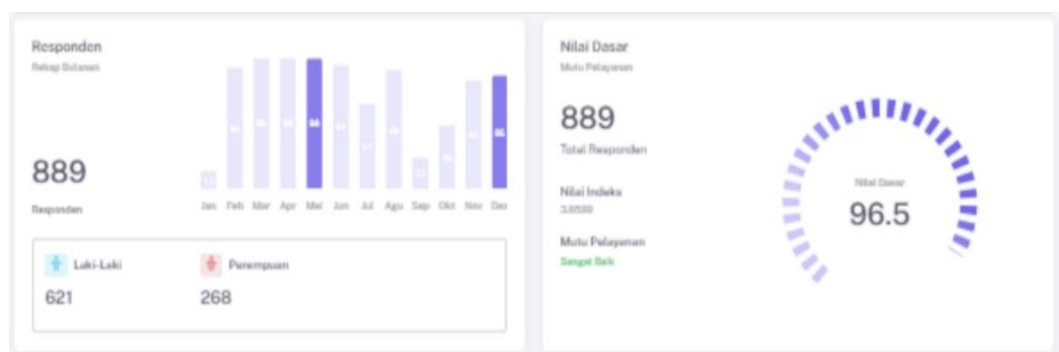
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut

dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal. Adapun pencapaian indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

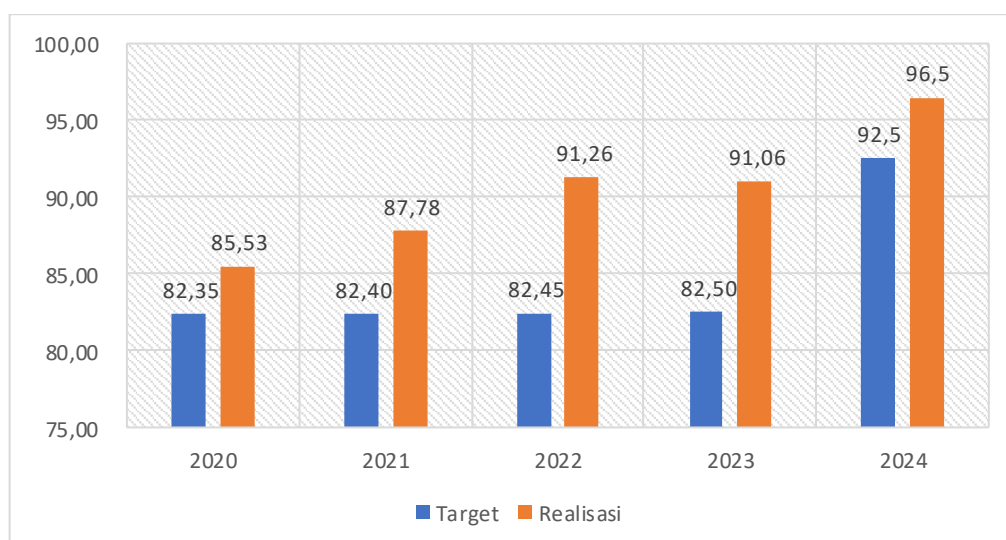
Gambar 2.2

Tangkapan layar Indeks Kepuasan Masyarakat



Grafik 1.2

Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2020-2024



Sumber : DPMPTSP, Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, dari target nilai IKM predikat Sangat baik tercapai nilai IKM dengan predikat Sangat Baik atau tercapai 100% dari target. Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh indeks sebesar **96,5 poin** yang dapat dikategorikan sebagai kategori **Sangat Baik**.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya. Pengelolaan Anggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena anggaran memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan anggaran berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal. Tujuan utama penganggaran adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk penyediaan barang dan jasa publik, belanja pegawai dan pelayanan publik.

Efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas anggaran adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan adalah yang baik merupakan dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan yang diinginkan. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Partisipasi publik yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat membantu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai tata kelola penatausahaan, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa:

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Kerja.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2024.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2024, terdapat 6 (Enam) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran belanja sebesar **Rp. 14.328.811.989,-** sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Persentase)	5,6	139.816.750
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliun)	6,73	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	28,5	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2	32.696.000
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	7,4	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja (Persen)	18,5	135.000.000
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (Persen)	94,58	

		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	92,5	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14%	585.147.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100%	142.857.100
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah IKM	AA Sangat Baik	13.343.295.139
Jumlah				14.328.811.989

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.286.778.630	12.567.669.674	94,59
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.334.000	42.889.800	98,97
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.435.754.415	6.936.143.901	93,28
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.000.000	15.850.000	79,25
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.881.750	165.363.250	90,92
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.105.804	644.374.062	92,44
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.620.760	850.549.645	99,76
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.210.421.410	3.099.921.751	96,56
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.660.491	812.577.265	96,09

II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	146.333.259	124.074.000	84,79
9	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	126.333.259	111.791.700	88,49
10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	20.000.000	12.282.300	61,41
III	Program Promosi Penanaman Modal	32.696.000	29.539.600	90,34
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.696.000	29.539.600	90,34
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	135.000.000	119.257.530	88,34
12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	135.000.000	119.257.530	88,34
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	585.147.000	527.593.730	90,16
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	585.147.000	527.593.730	90,16
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	142.857.100	142.389.600	99,67
14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.857.100	142.289.600	99,67
	JUMLAH	14.328.811.989	13.510.524.134	94,29

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 sebesar **94,29%**.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, kemudian telah di ukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penghargaan

Pencapaian Tahun 2024 diikuti dengan penerimaan penghargaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, penghargaan yang diterima diantaranya :

1. Peringkat ke-2 Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.



Penghargaan ini diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat bapak Bey Machmudin, pada Gebyar Pelayanan Terpadu

tahun 2024 yang diselenggarakan di seluruh Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kantor Kecamatan Purwakarta.

Pencapaian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemudahan berusaha di Purwakarta.

2. Pemenang dalam “West Java Investment Challenge”.



Kabupaten Purwakarta berhasil menjadi salah satu pemenang dan meraih penghargaan dalam *Investment Challenge*, pada WJIS tahun 2024 sebagai “*Best Investment Project for*

Basic Needs & Social Welfare”. Kabupaten Purwakarta berhasil menjadi salah satu pemenang dan meraih penghargaan dalam *Investment Challenge*, pada WJIS tahun 2024 sebagai “*Best Investment Project for Basic Needs & Social Welfare*”. Penghargaan

tersebut diberikan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kepada Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta Benni Irwan yang pada kesempatan tersebut didampingi Kepala DPMPTSP Hariman Budi Anggoro, ST,.MT. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dalam rangka penggalan potensi dan peluang investasi di Kabupaten/Kota serta pemerataan realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat. *West Java Investment Summit* ke-6 tersebut menjadi ruang untuk memberikan informasi potensi dan peluang investasi serta ajang bagi pemangku kebijakan untuk menampilkan seluruh potensi investasi dalam bentuk visual agar calon investor dapat melihat posisi dan profil proyek dengan lebih detail dan jelas

3. Top 5 Project Investment Challenge tahun 2024

West Java Industrial Meeting mengusung tema "Meningkatkan Kinerja Sektor Ekonomi Berdaya Ungkit Tinggi Guna Mendorong



Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang Berkelanjutan", yang diadakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk memperkuat sektor ekonomi di Jawa Barat melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Pada momen tersebut juga sekaligus pemberian penghargaan kepada Top 5 *Project Investment Challenge* tahun 2024

salah satunya Kabupaten Purwakarta yang berhasil meraih penghargaan tersebut.

4. Juara 2 dalam Anugerah Purwakarta Dalam Inovasi (PADI) tahun 2024

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta meraih juara 2 dalam Anugerah



Purwakarta Dalam Inovasi (PADI) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Kabupaten. Acara ini bertujuan untuk mendorong perangkat

daerah meningkatkan inovasi dan pelayanan, serta mendorong penerapan *Good Government*. Inovasi GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online) dari DPMPTSP Purwakarta berhasil meraih penghargaan berkat kemampuannya dalam efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan transparansi, serta memudahkan monitoring dan pelaporan. Selain itu, aplikasi GASPOL yang stabil, cepat, dan responsif juga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan dengan lebih nyaman.

5. Penghargaan Ombudsman RI Tahun 2024



DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menerima penghargaan dari Ombudsman RI atas pencapaian dalam pelayanan publik terbaik dengan kategori A dan nilai 95,76. Penghargaan diserahkan oleh

Sekretaris Daerah Kab. Purwakarta Norman Nugraha pada apel pagi bertempat di Taman Maya Datar. Di tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah

masuk zona hijau dalam pemberian pelayanan publik. Tentunya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

6. Penataan Arsip Terbaik Ke-2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, berhasil meraih piagam penghargaan



Penataan Arsip Terbaik ke-2 antar Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Prestasi ini

merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh tim dalam memastikan pengelolaan arsip yang tertib, rapi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas penataan arsip di masa mendatang.

7. Juara I LCCA

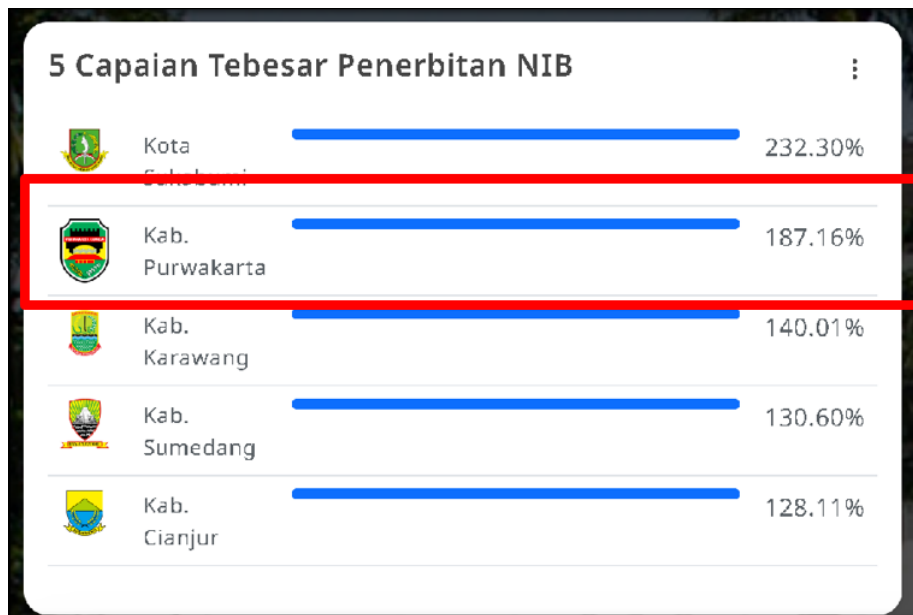
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berhasil meraih juara 1 dalam



Lomba Cerdas Cermat Aparatur (LCCA) antar Perangkat Daerah Se-Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. LCCA tahun 2024 dalam rangka Hari Jadi Kota Purwakarta ke-193 dan

Kabupaten Purwakarta ke-56

8. Terbaik Ke-2 Pencapaian Persentase Capaian NIB Se-Jawa Barat.



9. MPP Bale Madukara sebagai Mal Pelayanan Publik Kategori Prima berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 661 Tahun 2024 Hasil Evaluasi MPP Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024.

BAB IV.

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan pengelolaan kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan telah konsisten dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program kerja urusan penanaman modal dapat dinyatakan berhasil, karena capaian kinerja rata-rata terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan nilai Capaian Kinerja Organisasi melampaui **100%**

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan dengan capaian **94,29%**, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPPTSP termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif** dan **Cukup Efisien**.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator target kinerja utama dan indikator kinerja kunci agar lebih berorientasi hasil;
2. Perlu melakukan penyesuaian terhadap indikator target kinerja yang capaiannya telah melebihi target;

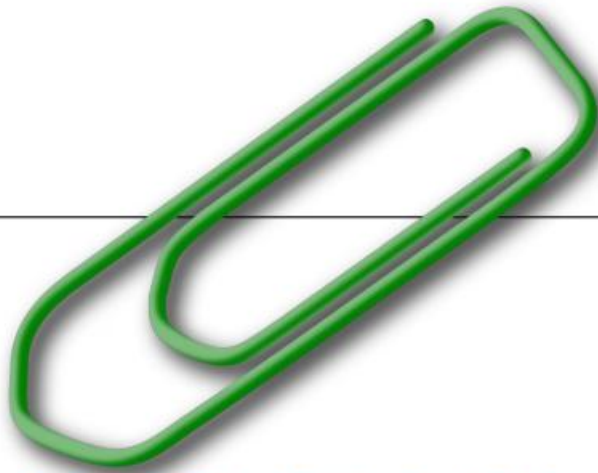
3. Belum maksimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman pencapaian indikator target dalam hal pengelolaan kinerja pada sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi, sehingga berdampak terhadap capaian output dan target kegiatan dan sub kegiatan.;
4. Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja agar selaras dengan sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi dan jika terjadi perubahan kebijakan anggaran (*refocusing* atau *automatic adjustment*) agar dibuat penyesuaian Perjanjian Kinerja;
5. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan pengukuran dan evaluasi kinerja, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kendala dalam upaya pencapaian tujuan;
6. Memperkuat pemahaman kepada seluruh pegawai terhadap target kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi perhitungan target sebagai upaya keselarasan dalam pencapaian target kinerja.

Purwakarta, 28 Pebruari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Hariman Budi Anggoro, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 pos-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK.01/Kep.25 -DPMPTSP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43).
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tanggal 6 Juli 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88).

18. Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana untuk disebutkan pada diktum KESATU merupakan acuan pengukuran keberhasilan dari pencapaian kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana untuk disebutkan pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013

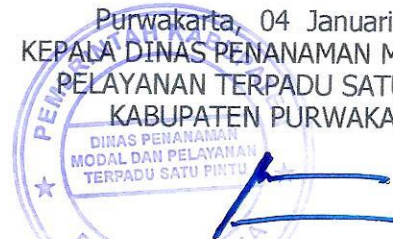
Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. PJ. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kab. Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
Nomor : HK.01/Kep.25 -DPMPTSP/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Formulasi: Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun n	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	8 T
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Formulasi: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Nilai SAKIP	Formulasi: SAKIP: Penilaian Terhadap Akuntabiitas Perencanaa Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.	Laporan Reviu AKIP	AA

Purwakarta, 04 Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : PJ. Bupati Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwakarta, 4 Januari 2024

Pihak Kedua,


BENNI IRWAN

Pihak Pertama,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8 Triliun
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 110.116.509	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 177.500.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 135.000.000	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 585.147.000	DAK NON FISIK
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 120.000.000	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.108.837.852	APBD

Purwakarta, 4 Januari 2024

Bupati Purwakarta,

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta


BENNI IRWAN


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP : 19680820 198803 1 002
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

Drs. IRFAN HAKIM, M.Si
NIP. 19680920 198803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan MPP Bale Madukara Kategori Minimal "Sangat Baik". 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk MPP dan PTSP Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	12 Laporan 12 Laporan	Non IKU IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



Drs. IRFAN HAKIM, M.Si
 NIP. 19680920 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP : 19731114 200701 2 005
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu



R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP. 19731114 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat MPP dan PTSP	Sangat Baik	IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT,
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP. 19731114 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP : 19800513 200604 1 010
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024
Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009


INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP. 19800513 200604 1010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	Non IKU
2.	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 5. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.437.000	APBD
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.440.686.255	
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.000.000	

Pihak Kedua



Ir. H. YADI HERyadi, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 17 Januari 2024
Pihak Kesatu



INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP. 19800513 200604 1010



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP : 19750411 199903 2 001
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua


Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak Kesatu


ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP. 19750411 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Non IKU
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	
		3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang	
3.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terlayani	100%	
		5. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
		6. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
		7. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	
		8. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	
		9. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	
		10. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	
		11. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	
		12. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
4.	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
		14. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	

		15. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	
		16. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	
		17. Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	
		18. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit	
		19. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
		20. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :		
	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	APBD
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.000.000	
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000	
	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
	5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.500.000	
	6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.025.303	
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.004.000	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
	9. Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	
	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.058.000	
	11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	
	12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
	13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.070	
	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.464.876.573	
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000	
	16. Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
	17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000	

	18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000 99.960.000	
--	---	--------------------------------------	--

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



[Signature]

Ir. H. YADI HERYADI, MT.

NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak Kesatu

[Signature]

ENDANG SRI LESTARI, SE

NIP. 19750411 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP : 19700203 200701 2 001
Jabatan : Kasubag Keuangan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak kesatu



HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP. 19700203 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 % 1 Laporan 3 Laporan	Non IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024

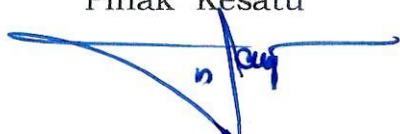
Pihak Kedua



[Signature]

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
 NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak Kesatu



HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
 NIP. 19700203 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP
NIP : 19861118 200501 1 002
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

KUNTO ADJIE WIBOWO, SP., M.Tr. AP.
NIP. 19861118 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 4. Jumlah Perusahaan Besar Yang bermitra dengan UMKM 5. Jumlah Proposal IPRO 6. Laporan analisa data realisasi investasi 7. Jumlah Laporan Pelaksanaan MPP Digital 8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Implementasi Inovasi	12 Kegiatan Usaha 351 Pelaku Usaha 22 Kegiatan Usaha 24 Perusahaan 6 4 laporan 12 Laporan 100 %	IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	585.147.000,-	DAK NF



 Pihak Kedua

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT,
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Januari 2024



 Pihak Kesatu

KUNTO ADJIE WIBOWO, SP., M.Tr., Ap
 NIP. 19861118 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP : 19790306 200604 1 006
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP. 19790306 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 5. Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	5,6% 8 T 12 Investor 28,5% 2	IKU Non IKU

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	40.116.509,-	APBD
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	70.000.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	177.500.000,-	APBD

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT,
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu



ARIF MARTANTO ST., MT.
 NIP. 19790306 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OCTIVIANI, S. ST., M.Tr.A.P
NIP : 19791020 2000604 2 012
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

OCTIVIANI, S. ST., M.Tr.AP
NIP. 19791020 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1. Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	100%	IKU
		2. Terlaksananya Penilaian Kinerja PTSP dan PPB	100%	IKU
		3. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Front Office sesuai Standar Pelayanan	100%	IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024


Pihak Kedua,
HARIMAN BUDI LANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

OCTIVIANI, S.ST., M.Tr.AP
NIP. 19791020 200604 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
NIP : 19800809 200604 1 013
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak kedua

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT,
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.PI
NIP. 19800809 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100%	Non IKU

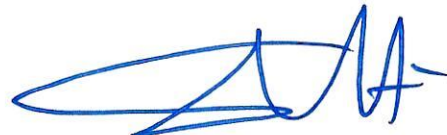
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	120.000.000,-	APBD

Pihak Kedua



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT,
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Januari 2024
 Pihak Kesatu



DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
 NIP. 19800809 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el: dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA KENCANA, S.Pd
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

LINGGA KENCANA, S.Pd

NIP. 19790201200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1. Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	Non IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

LINGGA KENCANA, S.Pd
NIP. 19790201200901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP. 19670528 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketenagakerjaan	100%	NON IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

H. RIZA FAJAR PENGEMAMAN, S.Sos
NIP. 19670528 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RYAN ERVIANDI, ST
NIP : 19810802 200902 1 002
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

RYAN ERVIANDI, ST
NIP. 19810802 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1. Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	100%	NON IKU
		2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minimal 83 Poin	4 Laporan	NON IKU
		3. Persentase Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	NON IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu


RYAN ERVIANDI, ST
NIP. 19810802 200902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP : 19830301 200501 2 009
Jabatan : Penata Perizinan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP. 19830301 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	1. Rasio daya serap tenaga kerja 2. Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	18,5 % 94,58 % Sangat baik	NON IKU NON IKU IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 3. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	80.000.000,- 20.000.000,- 30.000.000,-	APBD APBD APBD

Purwakarta, 17 Januari 2024


 Pihak Kedua
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST. MT,
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

METTA RATNA MUSTIKA, SE
 NIP. 19830301 200501 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP : 19660502 199103 2 007
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu


ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd., M.Si.
NIP. 19660502 199103 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan di Gerai Pelayanan Publik	12 Laporan	NON IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd., M.Si.
NIP. 19660502 199103 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8 Triliun	IKU
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	IKU
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	Non IKU

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran

Rp.	13.108.837.852
Rp.	110.116.509
Rp.	177.500.000
Rp.	135.000.000
Rp.	585.147.000
Rp.	120.000.000

Purwakarta, 17 Januari 2024



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

Ir. H. YADI HERyadi, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Pos-el : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

RADEN HERI LUKMAN, SH.
NIP. 196705 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Penanaman Modal	12 Laporan	IKU

Purwakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



RADEN HERI LUKMAN, SH.
NIP. 196705 199803 1 003

PENETAPAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) SESUAI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

**DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS	NAMA PEMANGKU JABATAN
1	Pengawas Penanaman Modal	Melakukan kegiatan pengawasan di bidang penanaman modal	Dewi Susanti, SKM, M.KM
2	Analisis Dokumen Perizinan	Mengumpulkan dan mengolah data, peraturan serta informasi berdasarkan pedoman dalam rangka melakukan kegiatan analisis kelayakan teknis perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, tenaga kerja, kesehatan, perhubungan, dan barang milik daerah	Dadah Sri Hidayati, A.KS
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dewi Utami, S.Sos
4	Bendahara Penerimaan	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dadan Hindarsah
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Asun Sunarya, S.M
6	Penata Keuangan	Melakukan kegiatan pencatatan, penerimaan, pengeluaran, pemeriksaan dan penataan keuangan	Nunung Lindawati, SE
7	Pengelola Data	Mengelola data pengembangan dan promosi penanaman modal dengan cara manual maupun elektronik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Wawan Hermawan
8	Pengelola Keuangan	Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/penginputan dan pengolahan di bidang daftar gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	Yayan Yulian
9	Pengelola Program dan Pelaporan	Menerima dan mengelola bahan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya	Rusmana

10	Pengadministrasi Persuratan	Menghimpun, mencatat dan mendokumentasikan berkas persuratan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi di lingkungan unit kerja	Junaedi
11	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Dede Sulaeman
12	Pengelola Pengawasan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan	Edwin Daniel Farid
13	Pengelola Keuangan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan	Akmaludin
14	Pengelola Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan bidang kepegawaian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Rini Prihantini
15	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Dina Kristiana
16	Analisis Penanaman Modal	Melakukan kegiatan analisis yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan penanaman modal dalam rangka untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Lunuwih Putriasmara, SE
17	Analisis Dokumen Perizinan	Menerima, mencatat dan menyortir dokumen permohonan perijinan dan rekomendasi, Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen perijinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Mengelompokkan surat atau dokumen perizinan menurut jenis dan sifatnya, Mendokumentasikan surat masuk, keluar dan dokumen perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Rendra Natarino Pamungkas, S.ST
18	Analisis Dokumen Perizinan	Menerima, mencatat dan menyortir dokumen permohonan perijinan dan rekomendasi, Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen perijinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Mengelompokkan surat atau dokumen perizinan menurut jenis dan sifatnya, Mendokumentasikan surat masuk, keluar dan dokumen perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Ayyuta Rullyka Apsari, SH

19	Pengelola Perizinan	Mengelompokkan dokumen Perijinan menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian. Mengelola data dan pelaporan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara optimal. Menyiapkan bahan kerja pelaksanaan kunjungan lapangan permohonan izin sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Riksa Gunawan
20	Pengelola Perizinan	Mengelompokkan dokumen Perijinan menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian. Mengelola data dan pelaporan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara optimal. Menyiapkan bahan kerja pelaksanaan kunjungan lapangan permohonan izin sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Asril Fauzi
21	Pengelola Perizinan	Mengelompokkan dokumen Perijinan menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian. Mengelola data dan pelaporan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara optimal. Menyiapkan bahan kerja pelaksanaan kunjungan lapangan permohonan izin sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Titin Rohaeni
22	Analisis Dokumen Perizinan	Menerima, mencatat dan menyortir dokumen permohonan perijinan dan rekomendasi, Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen perijinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Mengelompokkan surat atau dokumen perizinan menurut jenis dan sifatnya, Mendokumentasikan surat masuk, keluar dan dokumen perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Rifqi Silmiawan, S.AB
23	Pengawas Penanaman Modal	Melakukan kegiatan pengawasan di bidang penanaman modal	Ahmad Soleh, S.E

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

HASIL PENYELARASAN KINERJA TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	11,5	Triliun
	KEPALA DINAS	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	Predikat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Predikat
2	Ir. H. YADI HERYADI, MT	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
	SEKRETARIS		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMPTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan

			Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan
			Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan
			Terjaganya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan
3	Hj. N. CAHYANI ALANI, SE	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang
	KASUBAG KEUANGAN		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
			Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
4	INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	PERENCANA AHLI MUDA		Tersusunnya dokumen LAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen

		Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 Paket
		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	terlaksananya reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	1 Laporan
			Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terselenggara sesuai ketentuan	Laporan Penyelenggaraan MCP KPK	4 Laporan
		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Evaluasi Komponen Pelayanna Publik yang tersusun sesuai ketentuan	1 Laporan
			Penilaian Kinerja PTSP dan PPB terlaksana sesuai Ketentuan	Dokumen Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) yang yang tersusun sesuai Ketentuan	1 Laporan
5	ENDANG SRI LESTARI, SE	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
	ANALIS SDM APARATUR	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pegawai yang memakai Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
			Meningkatnya Kompetensi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang
			Terlaksananya administrasi kepegawaian dan pembinaan SDM	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%

		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 paket
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		20 paket
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 dokumen
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2 Laporan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya surat menyurat dinas yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan

			Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	Laporan
		Terjaganya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit
			Terpeliharanya Kualitas Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	unit ("jenis")
			Terpeliharanya Kualitas Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465	unit
			Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor dan MPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit
			Terpeliharanya Halaman dan taman Gedung Kantor dan MPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	unit
6	Drs. IRFAN HAKIM, M. Si	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Publik di MPP Madukara Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan MPP Bale Madukara Kategori Minimal "Sangat Baik"	12	Laporan
			Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat MPP dan PTSP	Jumlah Laporan Pelaksanaan SKM untuk MPP dan PTSP Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	12	laporan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Kategori Minimal "Sangat Baik"	2	Laporan
7	RADEN HERI LUKMAN YUSUP, SH	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terkelolanya Pengaduan Penanaman Modal Yang Terselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Penanaman Modal	12,00	Laporan

8	KUNTO ADJIE WIBOWO, SP., M.Tr.A.P	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	Kegiatan Usaha
			Terselenggaranya bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	351	Pelaku Usaha
			Terlaksananya kegiatan pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	22	Laporan
			Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan	Jumlah Perusahaan Besar Yang bermitra dengan UMKM	24	Jumlah Perusahaan
			Terlaksananya <i>Investment Project Ready To Offer</i> (IPRO)	Jumlah Proposal IPRO	6	Proposal
			Tersajinya data realisasi investasi	Laporan analisa data realisasi investasi	4	Laporan
			Terlaksananya MPP Digital	Jumlah Laporan Pelaksanaan MPP Digital	12	Laporan
			Terlaksananya Inovasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Implementasi Inovasi	100	Persen
9	ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M. Si	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Gerai Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan di Gerai Pelayanan Publik	12	Laporan

		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan	Jumlah Perusahaan Besar Yang bermitra dengan UMKM	24	Jumlah Perusahaan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya <i>Investment Project Ready To Offer</i> (IPRO)	Jumlah Proposal IPRO	6	Proposal
10	ARIF MARTANTO, ST, MT	Meningkatnya kepastian hukum terkait fasilitasi dan kemudahan berusaha di daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen
			Tersusunnya Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	Dokumen
		Meningkatnya pemanfaatan informasi peluang investasi	Tersusunnya Naskah Akademis RUPM 2025-2030	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen
		Meningkatnya minat investasi	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen
			Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terkelolanya Media Sosial, Web dan Sistem Informasi DPMPSTP	Persentase Media Sosial, Web dan Sistem Informasi DPMPSTP yang dikelola	12	Laporan
			Terlaksananya penataan dan alih media arsip	Jumlah arsip yang didigitalisasi	100	Persen

			Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Gerai Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan di Gerai Pelayanan Publik	12	Laporan
			Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Persen
11	R. SETIA AMINAH NUR, S. Sos	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat MPP dan PTSP	Jumlah Laporan Pelaksanaan SKM untuk MPP dan PTSP Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	12	laporan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Publik di MPP Madukara Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan MPP Bale Madukara Kategori Minimal "Sangat Baik"	12	Laporan
12	OCTIVIANI RUHYANTO, SP., M.Tr.A.P	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	12	Laporan
			Terlaksananya Penilaian Kinerja PTSP dan PPB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kinerja PTSP dan PPB Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	1	Laporan
			Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Kategori Minimal "Sangat Baik"	2	Laporan
			Terkelolanya Pengaduan Penanaman Modal Yang terselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal	4	Laporan
13	METTA RATNA MUSTIKA, SE	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600	Pelaku Usaha
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	50	Pelaku Usaha

				Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
			Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	200	Kegiatan Usaha
			Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	2	Laporan
			Terlaksananya Penilaian Kinerja PTSP dan PPB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	1	Laporan
			Terlaksananya penataan dan alih media arsip	Terlaksananya penataan dan alih media arsip	100	Persen
14	RYAN ERVIANDI, ST	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	100	Persen
			Terlaksananya Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minimal 83 Poin	4	Laporan
			Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Persen
15	LINGGA KENCANA, S. Pd	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terkelolanya Pengaduan Penanaman Modal Yang terselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal	12	Laporan
			Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Persen

			Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	2	Laporan
16	H. RIZA FAJAR PANGEMANAN, S. Sos	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketenagakerjaan	100	Persen
			Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	100	Persen
			Terlaksananya penataan dan alih media arsip	Jumlah arsip yang didigitalisasi	100	Persen
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Publik di MPP Madukara Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan MPP Bale Madukara Kategori Minimal "Sangat Baik"	12	Laporan
17	DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S. Pi	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkelola, terkaji an termanfaatkan sesuai ketententuan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Penataan dan alih media arsip tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	1	Dokumen
18	RIZZA PUTRI ANDHINI, SE	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	arsip aktif, inaktif, vital dan statis yang terkelola	Persentase arsip aktif, inaktif, vital dan statis yang terkelola sesuai prosedur	100%	
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan dan membuat daftar arsip usul musnah	Arsip inaktif yang terseleksi untuk proses usul musnah yang terdokumentasikan	1 dokumen	

			Menyeleksi arsip inaktif yang akan diserahkan dan membuat daftar arsip usul serah, serta melaksanakan penyerahan arsip	Arsip inaktif yang terseleksi untuk proses penyerahan arsip yang terdokumentasikan	1 dokumen
			Memberikan layanan jasa penelusuran arsip	Persentase jasa penelusuran arsip yang terlayani	100%
			Melakukan pemindaian dan pengolahan hasil pindaian	Persentase Jumlah Arsip Yang Dipindai	100%
19	RINI PRIHANTINI	Terlaksananya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pertanggungjawaban keuangan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD yang dikelola	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD yang tersusun	1 dokumen
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	administrasi kepegawaian yang terproses	jumlah pegawai yang terlayani proses administrasi kepegawaian	85 orang
			Mengelola sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi yang dikelola	6 sistem
			Mengelola pembinaan pegawai dan layanan konseling kinerja pegawai	Jumlah kegiatan pembinaan pegawai dan layanan konseling kinerja pegawai yang dikelola	14 kegiatan
			Mengelola kinerja pegawai	Jumlah pegawai yang dikelola kinerjanya	85 orang
		Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga kebutuhan kantor dpmptsp, MPP Bale Madukara dan Teras Madukara yang dikelola	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dikelola	1 paket
			Pertanggungjawaban keuangan peralatan rumah tangga kebutuhan kantor yang dikelola	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan peralatan rumah tangga kebutuhan kantor yang tersusun	12 dokumen

		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 dokumen
			Pertanggungjawaban keuangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 dokumen
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	konsumsi tamu dinas dan fasilitas tamu dinas lainnya yang tersedia	Jumlah tamu dinas dan fasilitas tamu dinas lainnya yang tersedia	2 laporan
			Pertanggungjawaban keuangan konsumsi tamu dinas dan fasilitas tamu dinas lainnya yang tersedia	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 dokumen
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mengelola pertanggungjawaban keuangan ..	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 dokumen
20	DEDE SULAEMAN	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Bahan rencana kerja yang terhimpun dengan lengkap	Dokumen rencana kerja yang terhimpun	100%
	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah dan dokumen Laporan aset	Bahan rencana kebutuhan barang milik daerah, dokumen laporan aset yang terhimpun dengan lengkap	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah dan dokumen laporan aset yang terhimpun	Lengkap
		Terlaksananya rekonsiliasi laporan pengelolaan barang milik daerah	Data anggaran yang terinput dengan lengkap	Data anggaran yang terinput	Lengkap
		Terselenggaranya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tepat Waktu	pemeliharaan kendaraan dinas yang terkelola	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan pajak kendaraannya tepat waktu	20 unit
		Terpeliharanya Kualitas Mebeul	barang meubeulair milik DPMPSTSP yang terpelihara	Jumlah laporan keadaan mebeulair yang terpelihara	4 jenis

		Terpeliharanya Kualitas Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya yang terkelola	Jumlah laporan keadaan mebeulair yang terpelihara	465 unit
		Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor dan MPP	perbaikan gedung yang terkelola	Gedung kantor dan gedung MPP yang terpelihara	2 unit
21	ASUN SUNARYA, S.M	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai aturan perundangan	Bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
			Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran yang terkelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran	100%
			Bahan Dokumen Pelaporan Kinerja yang terhimpun dengan Lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja	100%
			Sistem Informasi Pelaporan Kinerja yang terkelola sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan Pelaporan Kinerja	100%
			Koordinasi penyusunan laporan kinerja yang terlaksana sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja	100%
			Bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%
			Koordinasi penyusunan evaluasi kinerja yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%

			Sistem Informasi evaluasi kinerja yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi evaluasi kinerja	100%
			Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban Kegiatan	100%
		Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban Kegiatan	100%
22	RIFQI SILMIAWAN, S.AB	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai aturan perundangan	konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah konsep dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
	Analisis Dokumen Perizinan		Koordinasi penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah penyusunan konsep dokumen perencanaan dan penganggaran yang terlaksana sesuai ketentuan	100%
			Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran	100%
			Konsep Dokumen Pelaporan Kinerja yang terhimpun dengan Lengkap	Jumlah Konsep dokumen Pelaporan Kinerja	100%
			Manajemen Risiko yang dikelola sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Manajemen Risiko	100%
			Bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%
			Koordinasi penyusunan evaluasi kinerja yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%

			Sistem Informasi evaluasi kinerja yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi evaluasi kinerja	100%
23	RUSMANA	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai aturan perundangan	Bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
	Pengelola Program dan Laporan		Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
			Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran	100%
			Bahan Dokumen Pelaporan Kinerja yang terhimpun dengan Lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja	100%
			Sistem Informasi Pelaporan Kinerja yang dikelola sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan Pelaporan Kinerja	100%
			Koordinasi penyusunan laporan kinerja yang terlaksana sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja	100%
			Bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang terhimpun dengan lengkap	Jumlah bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%
			Koordinasi penyusunan evaluasi kinerja yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen evaluasi kinerja	100%
			Sistem Informasi evaluasi kinerja yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan Sistem Informasi evaluasi kinerja	100%

			Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban Kegiatan	100%
			Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban Kegiatan	100%
24	DEWI UTAMI, S.Sos	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN, laporan keuangan akhir tahun, dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran tepat waktu	a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan
	Bendahara Pengeluaran		b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu		
			c. Mengumpulkan bukti transaksi perhari		
			d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA		
			e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran		
			f. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran		
			g. Memungut dan menyetorkan pajak		
			h. Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku panjar		
			i. Menandatangani SPP		

			j. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.		
25	NUNUNG LINDAWATI, SE	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN, laporan keuangan akhir tahun, dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran tepat waktu	1. Menerima dan mencatat usul permintaan anggaran	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan
	Penata Keuangan		2. Merekapitulasi usulan permintaan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;		
			3. Mengetik dan mencetak usul permintaan anggaran;		
			4. Membuat kuitansi pengeluaran keuangan sesuai dengan jumlah permintaan;		
			5. Mengumpulkan bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan;		
			6. Mengetik dan mencetak surat-surat keuangan;		
			7. Menata dan memelihara dokumen keuangan;		
			8. Melayani peminjaman dokumen keuangan;		
			9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;		

26	DADAN HINDARSAH, SE	laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran tepat waktu	a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan dan Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP)	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan
	Bendahara Penerimaan		b. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan;		
			c. Menyetor semua uang ke Bank		
			d. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu		
			e. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap bulan).		
27	YAYAN YULIAN	Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang tersedia tepat waktu	a. Membuat daftar gaji	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan
	Pengelola Keuangan		b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji		
			c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan Membuat SPJ gaji;		
			d. Menyiapkan, Meneliti dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS, maupun Gaji		
28	AKMALUDIN	Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang tersedia tepat waktu	a. Membuat daftar gaji	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

	Pengelola Keuangan		b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji		
			c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan Membuat SPJ gaji;		
			d. Menyiapkan, Meneliti dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS, maupun Gaji		
29	Titin Rohaeni, S.M	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Penataan Ruang yang tersusun	Dokumen persyaratan Perizinan sektor PUPR dan Penataan Ruang terkelola sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	12 Laporan
	Analisis Dokumen Perizinan		Dokumen hasil survey Lapangan Perizinan dan Non perizinan sektor PUPR dan Penataan ruang terkelola sesuai ketentuan		
			Dokumen administrasi rapat teknis terkelola sesuai ketentuan		
			Data pemohon terinput lengkap pada aplikasi Si Cantik dan SIMBG		
			Dokumen SPJ Keuangan bulanan tersusun lengkap dan akuntabel		
30	Dadah Sri Hidayati, AKS	Penataan dan alih media arsip yang terdigitalisasi	pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	12 Laporan
	Analisis Dokumen Perizinan	Pengelolaan Pelayanan Front Office sesuai Standar Pelayanan yang terlaksana sesuai standar pelayanan	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Front Office	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Front Office	12 Laporan

		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terlaksana sesuai aturan perundangan	Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	12 Laporan
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah laporan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 Laporan
31	LINUWIH PUTRIASMARA, S.E	Tersusunnya Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
	Analisis Penanaman Modal	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
		Tersusunnya Naskah Akademis RUPM 2025-2030	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
		Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah laporan bahan penyusun kegiatan	1 Dokumen
32	AHMAD SOLEH, S.E	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya yang dilaporkan	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Laporan
	Pengawas Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang terlaksana	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	12 Laporan

		Terlaksananya kegiatan pengawasan	Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku usaha yang dianalisa dan Diverifikasi	Jumlah bahan analisa dan verifikasi yang tersedia	12 Laporan
		Terlaksananya Fasilitas Kemitraan	Perusahaan Besar Yang bermitra dengan UMKM	Jumlah laporan data perusahaan tahun 2024	12 Laporan
		Terlaksananya Investment Project Ready To Offer (IPRO)	Jumlah bahan Proposal IPRO yang terealisasi	Jumlah laporan proposal IPRO	12 Laporan
33	DEWI SUSANTI, SKM. MKM	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya yang dilaporkan	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Laporan
	Pengawas Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang terlaksana	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	12 Laporan
		Terlaksananya kegiatan pengawasan	Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku usaha yang dianalisa dan Diverifikasi	Jumlah bahan analisa dan verifikasi yang tersedia	12 Laporan
		Terlaksananya Fasilitas Kemitraan	Perusahaan Besar Yang bermitra dengan UMKM	Jumlah laporan data perusahaan tahun 2024	12 Laporan
		Terlaksananya Investment Project Ready To Offer (IPRO)	Jumlah bahan Proposal IPRO yang terealisasi	Jumlah laporan proposal IPRO	12 Laporan
34	EDWIN DANIL FARID	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya yang dilaporkan	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Laporan

	Pengelola Pengawasan	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang terlaksana	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	12 Laporan
		Terlaksananya kegiatan pengawasan	Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku usaha yang dianalisa dan Diverifikasi	Jumlah bahan analisa dan verifikasi yang tersedia	12 Laporan
35	AYUTTA RULLYKA APSARI, S.H	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah laporan Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12 Laporan
	Analisis Dokumen Perizinan	Terlaksananya Penilaian Kinerja PTSP dan PPB	Pelaksanaan Kegiatan Kinerja PTSP dan PPB Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kinerja PTSP dan PPB Kategori Predikat Minimal "Sangat Baik"	12 Laporan
		Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	Persentase Pelaksanaan Regulasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	12 Laporan
36	WAWAN HERMAWAN	Terlaksananya penataan dan alih media arsip	Pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	12 Laporan
	Pengelola Data	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Laporan
37	DINA KRISTIANA	Terlaksananya penataan dan alih media arsip	Pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	12 Laporan
	Pengelola Data	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Laporan

38	ASRIL FAUZI	Penataan dan alih media arsip yang terdigitalisasi	pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	12 Laporan
	Pengelola Perizinan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terlaksana sesuai aturan perundangan	Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	12 Laporan
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah laporan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 Laporan
39	RIKSA GUNAWAN	Penataan dan alih media arsip yang terdigitalisasi	pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	Jumlah laporan pelaksanaan arsip yang didigitalisasi	12 Laporan
	Pengelola Perizinan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terlaksana sesuai aturan perundangan	Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor yang terkelola	12 Laporan
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah laporan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 Laporan
40	JUNAEDI	Terlaksananya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemanfaatan barang milik daerah yang terinventarisir dengan lengkap	Persentase BMD yang terinventarisir	100%
	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH		Barang persediaan/pakai habis yang terkelola secara akuntabel	Jumlah laporan barang persediaan/pakai habis	1 laporan
			Dokumen Laporan barang persediaan yang disiapkan tepat waktu	Jumlah laporan barang persediaan/pakai habis aset yang disiapkan	17 laporan
			Rekonsiliasi laporan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	Jumlah laporan barang persediaan/pakai habis aset yang telah rekonsiliasi	4 dokumen

		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Cetak Dan Penggandaan Kantor Yang Terdistribusikan	Jumlah laporan barang persediaan/pakai yang terdistribusikan	12 laporan
		Terpeliharanya Kualitas Mebeul	Barang Meubeulair Milik DPMPPTSP Yang Terpelihara	Jumlah laporan keadaan mebeulair yang terpelihara	4 jenis
		Terpeliharanya Kualitas Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terkelola	Jumlah laporan Peralatan Dan Mesin Lainnya yang terpelihara	465 unit
		Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor dan MPP	Perbaikan Gedung Yang Terkelola	Gedung kantor dan gedung MPP yang terpelihara	2 unit

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembina Tk. I / IV b

REALISASI CAPAIAN KINERJA
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TWini	S/D TWini			
Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor							-			Data olahan LKPM
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5,6	Persen	146.333.259,00		8,32	111.791.700,00	148,57%	76,40%	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6,73	Trilyun Rp.			8,12				
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	Investor			413,00				
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	28,5	Persen			33,81				
						-	-			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-	-			
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	119.816.750	Penyusunan Perda dan Perkada	1,00	107.585.200,00	100,00%	89,79%	Perda Perizinan Berusaha
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	Dokumen	6.516.509	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	1,00	4.206.500,00	100,00%	64,55%	Rekomendasi Deregulasi
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						-	-			
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen		Naskah Akademis RUPM 2025-2030	-	-			Refocussing Anggaran Karena menunggu RUPM Pusat dan Provinsi
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	1,00	12.282.300,00	100,00%	61,41%	Bahan peta pad laman website https://investasi.purwakartakab.go.id/

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta,

Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. H. Yadi Heryadi, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 31 Januari 2025

Pengampu Outcome Program

Arif Martanto, ST, MT
NIP. 19790306 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA
(AKUMULATIF)**

No	Jenis Fasilitas Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	5	6	6
I.	Target Nilai Investasi (RPJMD)	60.000.000.000.000	65.000.000.000.000	70.000.000.000.000	75.000.000.000.000	93.320.000.000.000
II.	Realisasi Investasi					
	PMA (Rp)	60.640.107.962.208	62.838.499.733.628	68.542.559.443.077	76.140.613.609.757	79.448.453.871.306
	PMDN (Rp)	9.126.934.600.000	11.658.718.600.000	14.292.434.200.000	21.577.393.800.000	26.399.249.461.877
	Jumlah	69.767.042.562.208	74.497.218.333.628	82.834.993.643.077	97.718.007.409.757	105.847.703.333.183
	% Capaian RPJMD	116,28%	114,61%	118,34%	130,29%	113,42%
	Laju Pertumbuhan (%)	11,12%	6,78%	11,19%	17,97%	8,32%
	PMA (Rp)	3.690.863.702.733	2.198.391.771.420	5.704.059.709.449	7.598.054.166.680	3.307.840.261.549
	PMDN (Rp)	3.291.093.200.000	2.531.784.000.000	2.633.715.600.000	7.284.959.600.000	4.821.855.661.877
	Realisasi Tahun n	6.981.956.902.733	4.730.175.771.420	8.337.775.309.449	14.883.013.766.680	8.129.695.923.426
	Target RPJMD	N/A	N/A	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	6.730.000.000.000
	%Capaian			166,76%	297,66%	120,80%
III.	Jumlah Perusahaan					
	PMA	124	113	497	825	92
	PMDN	62	86	605	1.540	201
	Jumlah	186	199	1.102	2.365	293
IV.	Jumlah Tenaga Kerja					
	PMA (Orang)	3.843	2.111	15.013	5.586	80
	PMDN (Orang)	398	1.211	5.508	2.860	10.175
	Jumlah	4.241	3.322	20.521	8.446	10.255

JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

PMDN Rp. 4.821.855.661.877,-

PMA Rp. 3.307.840.261.549

Jumlah Rp. 8.129.695.923.426,-

1. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
1	PT.	ACE HARDWARE INDONESIA	Jl.Hz mustofa (asia plaza) Kel.tugujaya Kec. Cihideung kota Tasikmalaya	38.200.000
2	PT.	ACE HARDWARE INDONESIA	GEDUNG KAWAN LAMA, JL. PURI KENCANA NO. 01	38.200.000
3		AKUR PRATAMA	Jl. Pahlawan Revolusi No. 15	59.401.555.000
4	PT.	ALEXANDRA NUSANTARA PEMBANGUNAN	Ruko Cikarang Square Blok B.36	20.120.000.000
5		ALGHA BOEMI RAYA	Jalan Ipik Gandamanah Kampung Ceulibadak	12.905.000.000
6	PT.	ALHAMRA PUTRA MANDIRI	Kp. Waru Doyong RT 004 RW 002	306.000.000
7		ALLIN PUTRA JAYA	Jalan By Pass Jomin Nomor 272	3.751.000.000
8	PT.	ANDI UTAMA	Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Nomor: 28	10.367.830.000
9	PT.	ANYAR RETAIL INDONESIA	Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 341	170.000.000
10	PT.	APLIKANUSA LINTASARTA	MENARA THAMRIN LT.12, JL. MH. THAMRIN KAV.3	10.000.000
11	PT.	ARISTA JAYA LESTARI	JL. RAYA KALIMALANG NO. 19	97.508.421
12	PT.	ARISTA MITRA LESTARI	JL. Raya Kalimalang No. 19	57.550.000
13	PT.	ARTHA MULIA BETON	Jalan Raya Sadang Subang KM 16	24.669.020.824
14	PT.	ASRI MEDICAL CENTRE	JL.VETERAN NO.15 KP.CIHIDEUNG RT.002/003 DS.BABAKANCIKAO	4.511.169.734
15	PT.	ASRI PELANGI NUSA	Jl. Raya Sadang - Cikopo Bungursari	283.586.300.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
16	PT.	ASTRA INTERNATIONAL	Jl. Gaya Motor III No.3 Sunter II	91.350.000
17	PT.	ASTRA OTOPARTS TBK.	Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading	144.800.000
18	PT.	BAHTERA ADI WIJAYA	PERUM BUKIT BERBUNGA	247.000.000
19	PT.	BARIS FIKRI MULIA INDUSTRIES	Kp. Pangkalan	92.600.000
20	PT.	BERKAH ALZICO ANTALATIKA	Jl. Cijantung Parakanlima No. 9 Kp. Margasari - Cisalada	200.000.000
21	PT.	BERKAH DOA MULTAZAM	JL. FLAMBOYAN RT. 037/004, KEL. NAGRIKALER, KEC. PURWAKARTA	1.604.049.181
22	PT.	BERKAH ISYANDRA INDONESIA	Kampung Bakan Jonggol RT 002 RW 004	1.044.201.965
23	PT.	BERLIAN CAHAYA INDAH	Gedung Fakultas Kedokteran UPH Lt. 31	6.017.185.578
24	PT.	BERSAMA DAUKY MULYA	KP. HARIKUKUN RT.003 RW.007	24.711.930
25	PT.	BERSAMA ZATTA MULYA	KP. HARIKUKUN (KOMPLEK INDUSTRI PRAPANCA) RT.003 RW.007	22.000.000
26	PT.	BESLAND PERTIWI	WISMA BUKIT INDAH, BLOK L, KOTA BUKIT INDAH	3.068.722.973
27	PT.	BIO INDUSTRI NUSANTARA	JL. IR.H. JUANDA NO. 107	66.558.300
28	PT.	BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO	Kawasan Industri Cikao B nomor 1	6.376.297.255
29	PT.	BUKIT INTI MAKMUR ABADI	KOMPLEK PERGUDANGAN BIZ PARK JL.TAMBAK SAWAH NO.16C	397.095.497
30	PT.	BUMI CIBARUSAH INDAH	Jl. Niaga Raya Blok C No. 3, Kemang Pratama Bekasi	1.382.400.000
31	PT.	CARAKA ANUGRAH SANTOSO	Rukan Sentra Niaga Blok RSN 3 Nomor. 7 Grand Galaxy City Kel. Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan	488.600.000
32	PT.	CENGKARENG PERMAI	JL.DAAN MOGOT NO.48 C JELAMBAR	1.329.631.000
33	PT.	CHANDRA KEMAS ABADI	Jl. Blok 4 Kampung Bongas No. 6 RT. 06/RW. 03, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu	2.329.500.000
34	PT.	CHEMSTAR INDONESIA	KAMPUNG SAMPIH, DESA CIBINONG	2.965.500.000
35	PT.	CILEUNCA SUMBER REZEKI	Jl. Poros Cileunca Cilingga Cihantap Kp.Sindan	7.859.500.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
36	PT.	CIOMAS ADISATWA	JL. MT HARYONO KAV. 16, WISMA MILLENIA LT. 7	293.200.000
37	PT.	CIPTA NIAGA SEMESTA	JL. TOMANG RAYA NO. 21-23	679.000.000
38	PT.	CIPTA RAYA DATA MAKMUR	Wisma Bumiputera Lantai 7. Jl. Jend. Sudirman Kav.75	1.000.000.000
39	PT.	CISANGKAN	JL. H. ALPI NO.107, BANDUNG KULON	3.910.000.000
40	CV.	CITRA LAKSANA	Kampung Kadu Mekar	255.000.000
41	PT.	CITRADUTA SUKSES SEMESTA	GEDUNG CHASE PLAZA LANTAI 11 JALAN JEND SUDIRMAN KAV.21	17.488.467.331
42	PT.	CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI	Jl Purwakarta- Subang KP Kiara II	500.000.000
43	PT.	CONBLOC INTERNUSA	JL.RAYA SERANG KM.12, KP.CIREWED	1.547.700.000
44	PT.	DAYA ANUGRAH MANDIRI	JL. Soekarno Hatta No. 518	149.857.577
45	PT.	DAYA ANUGRAH MULYA	Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kaveling F5 - 7	38.154.900.000
46	PT.	DAYA INDAH YASA	KAWASAN BISNIS GRANADHA, PLAZA SEMANGGI LANTAI 10, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVELING 50	44.603.820
47	PT.	DELAMETA BILANO	GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS SATU, GEDUNG II LANTAI 4 RUANG NO.03B	2.881.500.000
48	PT.	DELAPAN BINTANG	JL.IPIK GANDAMANAH RT35, RW03, KEL MUNJULJAYA, KEC PURWAKARTA	6.837.100.000
49	PT.	DUNKINDO LESTARI	JL. HAYAM WURUK NO.9 A	23.549.320
50	PT.	ECOLE JAYA INDONESIA	KP. TEGAL LOA RT.011 RW.003 KARYAMEKAR- CIBATU	8.061.000.000
51	PT.	EKA MAS REPUBLIK	SINARMAS LAND PLAZA MENARA 2, LANTAI 25, JALAN M.H. THAMRIN NO. 51	5.000.000
52	PT.	EKANATHA ALAM SEGAR	Jalan Industri, Kampung Bayur RT/RW 006/003	49.431.470.000
53		ELMER KARYA SEJAHTERA	Perumahan Manggala Green Land Kampung Cinangka	81.000.000
54	PT.	EPID MENARA ASSETCO	TCC Batavia Tower One Lantai 16, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat	52.517.385
55	PT.	ERINAKA PERDANA	JL. PURWAKARTA-SUBANG KM.11, KARYA MEKAR, CIBATU, PURWAKARTA	672.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
56	PT.	EXCEL TECHNO LESTARI	Komplek Griya Inti Sentosa Blok A-1 No. 32-36	295.000.000.000
57	PT.	EXELLY ELEKTRIK INDONESIA	Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau	1.600.000.000
58	PT.	EXINDOKARSA AGUNG	JL.BEKASI TIMUR NO.136	50.400.000
59	PT.	FAST FOOD INDONESIA Tbk.	JL. MT. HARYONO KAV. 7	438.737.941
60	PT.	FORINDO MITRA UTAMA	JALAN RAYA SADANG SUBANG KM 5 NO 169	34.000.000
61	PT.	FORTUNA KARYA PERSADA	Kp. Sukamaju RT.14 RW. 04 Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kab. Purwakarta	11.522.000.000
62	PT.	GAYA HIDUP MASA KINI	WISMA KEIAI LT.5 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 3-4	16.300.000
63	PT.	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TARKA)	Taman Tekno J2 No. 2 BSD City Serpong Tangerang	272.000.000
64	PT.	GISTEX	JL. BRAGA NO. 106	2.621.072.481
65	PT.	GLOBAL PANGAN ABADI	KAWASAN INDUSTRI CIKAO PARK BLOK I NO. 8	17.886.400.000
66	PT.	GLOBAL TEKNIK AGRONUSA	KOMPLEK SUNTER PERMAI BLOK C NO 9, JL DANAU SUNTER UTARA	509.975.000
67		GOLDEN MAKMUR INDONESIA	JL.MOCHAMMAD ALI LT 2 NO.2	4.265.000.000
68	PT.	GRAHA BARA LESTARI	JL. BASUKI RACHMAT 28.	50.000.000
69	PT.	GRAHA LAYAR PRIMA	AIA CENTRAL LT. 26, JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV 48 A	67.053.363
70	PT.	GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk	AIA CENTRAL LT. 26, JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV 48 A	13.600.000
71	PT.	GUNUNG KECAPI	JL. CIDENG TIMUR NO. 17A	5.556.333.779
72	PT.	GUNUNG PATAPAAH ABADI	Jl. Ir. H. Juanda No. 6	267.900.000
73	PT.	HANDAL INDONESIA MOTOR	Jl. Teuku Nyak Arief No. 14	877.224.454.327
74	PT.	HANNAH ANGELINA TAMA	JALAN RAYA PROKLAMASI NOMOR 79	31.699.900.000
75		HANNY AGUSTINA	JL.RENGGONG MANIS NO.31	5.022.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
76	PT.	HARITAGE CAKRA PROPERTINDO	Ruko Plaza Niaga 2 Blok G no. 25, Jl. MH Thamrin - Sentul City	38.700.000.000
77	PT.	HARMONI MITRAJAYA	Jl. Tebet Timur III/15	183.000.000
78	PT.	HOLISTIC INDONESIA	KP.BABAKAN CARINGIN ,RT.08/05 DS.SALAMMULYA KEC.PONDOKSALAM	4.201.700.000
79	PT.	INDACHI PRIMA	Desa Cibinong	840.500.000
80	PT.	INDO HUSADA UTAMA	JALAN SALEMBA TENGAH NO. 28	776.505.284
81	PT.	INDO MINERAL RESEARCH	Jalan Pluit Utara Raya No. 18	95.600.000
82	PT.	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	SUDIRMAN PLAZA INDOFOOD TOWER LANTAI 23 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 76-78	169.481.978.685
83	PT.	INDOMARCO PRISMATAMA	Jalan Ancol Barat I Nomor 9-10	1.703.700.000
84	PT.	INDO-RAMA SYNTHETICS	DESA KEMBANG KUNING, KECAMATAN JATILUHUR 41152	101.658.678.894
85	PT.	INDOWISATA TEJA MAHATAMA	Jalan Raya Bungursari Ruko Harper No. 2	93.000.000
86	PT.	INNOVATE MAS INDONESIA	SINARMAS LAND PLAZA MENARA 2, LANTAI 25, JALAN MH. THAMRIN NO. 51	2.000.000
87		IR.HAMONG WARDOJO	JL.H.MANDOR / 35.A CILANDAK	4.605.000.000
88		JAGAD DUA PUTRA	JL. RAYA PURWAKARTA SUKATANI KM 10 GG. SMK YPB SUKATANI KP. CIMANGLID RT. 029 RW. 008	124.418.000.000
89	PT.	JAKATIJAYA MEGAH	JL.CILEDUG RAYA NO. 74	350.000.000
90	PT.	JANANI BUMI RESOR	JL.PARADISE TIMUR RAYA G II NO 1-2 SUNTER AGUNG PODOMORO	531.100.000
91	PT.	JASAMARGA JAPEK SELATAN	PT. Jasamarga (Persero Tbk), Cabang Jagorawi Lantai 4	957.749.900.000
92	PT.	JAYA BETON INDONESIA	PLAZA SLIPI JAYA, JALAN LETJEN S. PARMAN KAVELING 17-18	1.511.200.000
93	PT.	JCO DONUT & COFFEE	MAL KELAPA GADING 1 & 2 LANTAI DASAR UNIT# G-140 C & D, JALAN BOULEVAR KELAPA GADING BLOK M	545.500.000
94	PT.	KARYA MITRA INDORAMA	Graha Irama Lt. 15 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2	1.823.900.000
95	PT.	KARYA SEJAHTERA LESTARI	PERUM PONDOK JAYA INDAH	300.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
96	PT.	KENCANA WIRAUTAMA SAKTI	RUKO LAVERDE R.1-1A SERPONG PARK	1.600.000.000
97	PT.	KHABAMARA SEMESTA RAYA	JALAN INDUSTRI	21.810.000.000
98	PT.	KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	JL. BUDI UTOMO NO. 1	1.079.100.000
99	PT.	KINERJA MUTIARA PERSADA	KAMPUNG CINANGKA, RT.006/RW.003, DESA CINANGKA, KECAMATAN BUNGURSARI	151.200.000
100	PT.	KOMELT AIR ENGINEERING	Jl. Pandu Dewanata Raya Blok 2 No. 5 Bumi Gandasari	26.751.000
101	PT.	KRIDA BANGUN PERSADA	JL. KP.SUKAMANAH RT.016, RW.005	63.124.872.850
102	PT.	KRIDA RAGAM INTEGRA SOLUSI	GEDUNG KAWAN LAMA Lantai 3, Jl. Puri Kencana No. 1	222.200.000
103	PT.	LAN SENA JAYA	Kampung Sindang Jaya	22.761.400.000
104	PT.	LANCAR WIGUNA SEJAHTERA	Gedung Alfa Tower, Lantai 28, Jalan Sutera Barat Kav.7-9. Alam Sutera, Tangerang	188.000.000
105	PT.	LANGKAH HIDUP BARU	Kp. Cilandak Rt.003/001	116.100.000
106	PT.	LEMBU JANTAN PERKASA	Komplek Ruko Batas Pondok Bambu A3, Jl. Pahlawan Revolusi	76.990.043.000
107	PT.	LINK NET TBK	Gedung BeritaSatu Plaza (d/h Gedung Citra Graha) Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi	6.960.600.000
108	PT.	LINTAS BENUA LAND	Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati, Jl. RS Fatmawati No.39, Blok A1 No.42	6.435.000.000
109	PT.	MAKMUR ABADI VALVE	KP CIPARUNGSARI	41.319.200.000
110	PT.	MAKO ANUGERAH KREASINDO	RUKO INTERCON PLAZA NOMOR 10	166.000.000
111	PT.	MANDIRI SEJAHTERA SENTRA	Kp. Cikakak	8.627.000.000
112	PT.	MANGLAYANG BERKAH SEJAHTERA	JL. RAYA CIWIDEY RANCABALI KM 6, KP. CILASTARI	7.869.000
113	PT.	MATAHARI PUTRA PRIMA	GAJAH MADA PLAZA LT SG, JL. GAJAH MADA NO. 19-26	4.000.000
114		MATALA REALTY DEVELOPMENT	Komplek Buah Batu Square Blok A 09	25.479.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
115	PT.	MAXX COFFEE PRIMA	Karawaci Office Park Ruko Pinangsia Lippo Karawaci Blok L No. 55 Kel. Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas	429.960.432
116	PT.	MEGA AKSES PERSADA	Gedung Cyber 2 Tower lantai 3 unit A, B dan C, Jalan HR. Rasuna Said Blok X - 5 Nomor 13	889.400.000
117	PT.	MEGA DAYA TEKNOLOGI	JL. PRAMUKA KP. CIKADU	41.000.000
118	PT.	MEGAH GEMILANG STEEL	Jl. Raya Industri KM10	2.696.400.000
119	PT.	MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA	Dusun Karajan	16.868.380.631
120	PT.	MILLENNIUM KNITTING	JL. RAYA SADANG KM. 5 Nomor 168, Kampung Kiara Dua, RT 02, RW 01, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, JAWA BARAT	165.257.550
121	PT.	MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK	Gedung Panin Bank Center Lt 9 Jalan Jenderal Sudirman	236.200.000
122	PT.	MINISO INTERNASIONAL COMPANI	Gedung Puri Arta Prima Lantai 2, Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36	1.000.000
123	PT.	MITRA TANGGUH UTAMA	KP.SUKASARI RT.003/001.CIWARENG.KEC.BABAKAN CIKAO	36.589.311
124	PT.	MITRA TATA GEMILANG	Perum Pesona Kalangsuria, Blok B.9 No.16 Rt.022 Rw.006	53.621.000.000
125	PT.	MUKTI MANDIRI LESTARI	JL.RAYA PEMDA DELTAMAS NO. 28,	82.000.000
126	PT.	MULTI ADHI PERKASA	JL. PUNGKUR NO. 34	100.000
127	PT.	MULTI OPTIMAL SENTOSA	Jalan Raya Industri Dusun 3 Bayur	197.552.471.879
128	PT.	MULTI SARANA PAKANINDO	RUKAN PERMATA ANCOL BLOK F NO.20 JL. RE.MARTADINATA	20.110.600.000
129	PT.	MULTIRASA NUSANTARA	JL. TIPAR CAKUNG KAV F5-7	564.634.067
130	CV.	MUTIARA INTER BUANA	Kawasan Industri Cikao PT. Samudra Buana Texindo, Blok H Nomor 1 Gedung C	2.319.852.736
131	PT.	NASINDOSEJAHTERA CEMERLANG	Jl. Raya Serpong KM.7 Komplek MultiGuna Blok B1 No.10	28.000.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
132		NATIONAL ASSEMBLERS	JL. RAYA BEKASI KM.18, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR	76.445.753.640
133	PT.	NEWARK ENGINEERING INDONESIA	Gedung AXA Tower Kuningan City Lantai 36 Unit 5-6, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18	6.905.000.000
134	PT.	NIAGATAMA KENCANA	Jl. Inspeksi Cakung Drain Kavling F5-7	509.073.000
135	PT.	NOVINDO AGRITECH HUTAMA	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok A-2/1	3.000.000
136	CV.	NURAGUNG JAYA	JL. PURWAKARTA - BANDUNG KM 14	25.000.000
137	PT.	PANCA BUDI LOGISTINDO	JL. K H AGUS SALIM NO. 15	106.309.000.000
138	PT.	PANENARTA NIAGA PERSADA	JL. PIPIT GRIYA AVIVA RT. 002 RW. 001	111.151.500.000
139	PT.	PELANGI BUNGA LESTARI	THAMRIN RESIDENCES RUKO HGB BLOK RB NO 07B-08B KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT	72.400.000.000
140	BUMN/ BUMD	PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL	JL. D.I. PANDJAITAN KAVLING 11	368.144.000
141	PT.	PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBAN	Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo	350.000.000
142	Perum	PEMBANGUNAN RUMAH NASIONAL (PERUMNAS)	Jl. Sei Landak Timur No. 36	164.900.000
143	PT.	PENJALINDO NUSANTARA	JL. PALMERAH SELATAN NO.22,GELORA,TANAH ABANG	1.174.970.165
144	PT.	PERKEBUNAN NUSANTARA I	JL. KEBUN BARU PO BOX 1	2.429.600.000
145		PERSADA SOKKA TAMA	JL. KH. NOER ALI NO. 3A, RT.002/025 KAYURINGIN JAYA	431.095.540
146	PT.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, MELAWAI, KEBAYORAN BARU	720.016.396
147	PT.	PESONA NATASHA GEMILANG	Gedung Natans Building Sejahtera Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65	215.079.123
148	PT.	PESTA PORA ABADI	Jalan Bukit Dieng Permai C-12 A	47.000.000
149	PT.	PLN NUSANTARA POWER	JL. KETINTANG BARU NO.11, KETINTANG, GAYUNGAN	60.661.908.070
150	PT.	PORI HAERA ABADI	Kp Sukamanah	3.500.000.000
151	PT.	PRABU AGRO MANDIRI	Jl. Irigasi No. 3	4.389.000.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
152	PT.	PRODIA WIDYAHUSADA	JL. KRAMAT RAYA NO. 150 KENARI-SENEN	9.652.250
153	PT.	PROPERTINDO KREASI UTAMA	VILLA CIGANEA INDAH C NO. 1	10.796.761.000
154	PT.	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA	Jalan Raya Warung Jeruk RT 012, RW 004	4.811.364.991
155	PT.	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA PAMOYANAN	KAMPUNG PAMOYANAN	759.708.676
156	PT.	PURWAKARTA TELEVISINDO	JL.VETERAN NO.165	2.034.217.929
157	PT.	PUTERA MARWAH BERSAUDARA	Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga No. 207	472.199.800
158		PUTRA CITARUM REALTINDO	JALAN RAWASARI NO.3	9.920.710.000
159	PT.	PUTRA NAGA INDOTAMA	KAWASAN INDUSTRI KARET JAYA KM.7, RT.001/RW.003, DESA KARET, KEC.SEPATAN, KAB.TANGERANG	17.480.300.000
160		RAFLESIANA MEDIKA PERDANA	Jl. Kopi Kp. Mulyasari No.36	560.000.000
161	PT.	RAMAYANA LESTARI SENTOSA	JL. KH. WAHID HASYIM NO.220 A-B	4.323.600.000
162	PT.	REKSO NASIONAL FOOD	JL.BOULEVARD ARTHA GADING KAV.A/1	3.873.700.000
163	PT.	RESKA MULTI USAHA	JL. KARANG ANYAR NO.1, RT.06 RW.10, KELURAHAN KARANG ANYAR, KECAMATAN SAWAH BESAR	3.000.000
164	PT.	RESTU MAHKOTA KARYA	kp selaawi	42.300.000
165	PT.	RIZKI ANUGRAH MANDIRI	JL. RAWA PASUNG RT 002 RW 001, Kel. Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat	1.065.000.000
166		SAHARA MULTI HIJAU	Perumahan Pesona Panghegar Blok A No. 02 RT. 002 RW. 005	106.162.747.400
167	PT.	SALAEURIH MUDA PERKASA	Jl. Pramuka No. 19	519.380.870
168	PT.	SAMUDRA BUANA TEXINDO	Jl. Soekarno Hatta Gg. Saleh Abas RT. 006 RW. 003	37.832.100.000
169	PT.	SARI COFFEE INDONESIA	GEDUNG SAHID SUDIRMAN CENTER LT.27 JL. JEND SUDIRMAN KAV.86	1.207.373.481

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
170	PT.	SARIMELATI KENCANA	GRAHA MUSTIKA RATU LT.8 JL.JEND GATOT SUBROTO	68.354.487
171	PT.	SAYAP MAS UTAMA	JL.TIPAR CAKUNG KAV F 5-7 CAKUNG BARAT, CAKUNG	2.550.233.500
172	PT.	SELO AGUNG	GUNUNG GADUNG KAMPUNG CIKADU	1.850.000.000
173	PT.	SHARIA GREEN LAND	Jl. Kol. Masturi Nomor 41	8.990.000.000
174	PT.	SIDARTA BUMI PRATIWI	Ruko Perumahan Bungursari Lakeview No.1-2 kp. Awi Mekar RT. 011 RW.006	3.010.000.000
175	PT.	SINAR SERVIS INDONESIA	Perum Bekasi Timur Regensi Blok G 6/25	3.700.000.000
176	PT.	SINAR SUKSES MANDIRI	KOMP. RUKO LATUMENTEN BLOK AA NO.17, JL.JELAMBAR TIMUR NO.50, JELAMBAR, JAKARTA BARAT	35.731.000.000
177	PT.	SINARNIAGA SEJAHTERA	JL. WAHAB AFFAN NO. 135	3.085.445.226
178	PT.	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	GEDUNG ALFA TOWER LANTAI 12, JALAN JALUR SUTERA BARAT KAV. 9, ALAM SUTERA	879.600.000
179	PT.	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	GEDUNG ALFA TOWER LANTAI 12, JALAN JALUR SUTERA BARAT KAV. 9, ALAM SUTERA	14.900.000
180	PT.	SUMBER KARJA INTERNASIONAL	Jl. Raya Purwakarta - Bandung KM.8 Kp. itapen Rt. 10/04, Ds. Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat	3.100.000.000
181	PT.	SURGANYA MOTOR INDONESIA	Jalan Tole Iskandar No.24	201.127.735
182	PT.	SURI TANI PEMUKA	Wisma Millenia Lt.6, Jl. M.T. Haryono Kav.16	97.730.061.451
183	PT.	TANIKAYA MULTI AGRO	Jalan Poltangan Raya Nomor 50 B	200.000.000
184	PT.	TATA GRIYA SARANA	GANG RAWA SADANG	135.435.800.000
185	PT.	TATA METAL LESTARI	JL.ARJUNA UTARA NO.89, DURI KEPA,	1.326.644.302
186	PT.	TATALOGAM LESTARI	Jalan Arjuna Utara No 89	149.925.000
187	PT.	TEGUH ANINDYAGUNA	Jalan Aster Barat II, Perumahan Metro Cikopo No.4	2.059.650.409
188	PT.	TEKNOLOGI MINERAL BATUBARA	MEGA GLODOK KEMAYORAN BLOK D12 & D15, JL ANGKASA B-6 KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN	500.000.000
189	PT.	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk.	Gedung Graha Citra Caraka Lantai 5Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52	617.300.000

NO	BADAN USAHA	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI INVESTASI
190	PT.	TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	JL TOMANG RAYA NO. 11, TOMANG	2.325.557.482
191	PT.	TIRTAKENCANA TATAWARNA	Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo KM 19	843.893.594
192	PT.	TITIAN PERSADA	JL. IPIK GANDAMANA – PESONA ANGGREK RAYA NO. 5, RT. 02 / 01, KEL. TEGAL MUNJUL, KEC. PURWAKARTA	27.000.000
193	PT.	TON HADI	Jl. Raya Sadang-Subang Kp. Cimaung	1.973.837.056
194	PT.	TOWER BERSAMA	THE CONVERGENCE INDONESIA LT 11, Kawasasn Rasuna Epicentrum. Jl HR Rasuna Said,	11.000.000
195	PT.	URIMESSING SECURITY GUARD SERVICE	RUKO SENTRA NIAGA 2 NO. 30	400.000.000
196		VIVI JUSTITIA	KAVLING PEMDA SUKAMULYA II RT. 005 RW. 006	6.063.000.000
197	PT.	WARNA JAYA SENTOSA	JL. HEGARMANAH NOMOR 25	30.100.000
198	PT.	WIRA SANDI	JL. KESEHATAN NO.16	16.200.000
199	PT.	YONTOMO SUKSES ABADI	KOMPLEK DAAN MOGOT ARCADIA BLOK G4 NO. 8 JL. DAAN MOGOT KM.21 BATU CEPER TANGERANG	220.400.000
200		YUYUN KADARLIA	SIMPRUG GOLF XV NO. 31	6.350.000.000
201	PT.	ZEIN BAHEERA	Jalan Terusan Kapten Halim No. 149	100.000.000
JUMLAH				4.821.855.661.877

2. Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
1	PT. ADIENT AUTOMOTIVE INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Blok. H-Ii No. 6-11, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari	Amerika Serikat	13.864.503.143
2	PT. AGROBIS PANCA EKATAMA	Menara Jamsostek Lt 21 Jl Gatot Subroto Kav. 38	Korea Selatan	153.369.250

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
3	PT. ANEKA PETROINDO RAYA	Akr Tower Lt. 25, Jl. Panjang No. 5	Inggris	14.530.503.294
4	PT. ARUNA HIJAU POWER	Epicentrum Walk Lantai 3 - A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Hr. Rasuna Said	Singapura	407.253.282.048
5	PT. AUTOTECH INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok Diii No.2	Jepang	6.552.608.775
6	PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA	M Gold Tower Lantai 18 E-H, Jalan Kh Noer Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17148	Jepang	8.050.503.205
7	PT. BONGMAN INTERNATIONAL	Jl.Dahlia I Blok D2 N0.1 Taman Modern	Jamaica	136.499.917
8	PT. BOUNTY SEGAR INDONESIA	The Kensington Commercial, Jl Boulevard Raya B No 17	Singapura	2.787.889.208
9	PT. CITRA ASIA RAYA	Jl. Raya Sadang - Subang No. 28	R.R. Tiongkok	256.500.038
10	PT. CLAMA INDONESIA	St.2 Blok D.Ii No.11-12. Kota Bukit Indah	Belgia	13.957.338.607
11	PT. DAWOO INTERNATIONAL	Kp. Karangmulya,	Korea Selatan	116.026.043
12	PT. DOM PIZZA INDONESIA	Gedung Sahid Sudirman Center Lt 27 Jl Jend.Sudirman Kav.86,	Singapura	49.878.656
13	PT. DONG YANG ILLUSTRATION INDONESIA	Kampung Krajan	Korea Selatan	92.499.996
14	PT. EAST WEST SEED INDONESIA	Desa Benteng, Po Box 1	Belanda	137.244.639.776
15	PT. FEI TEXTILE INDUSTRIES	Kawasan Industri Cikao Pt. Samudra Buana Texindo H No. 01	R.R. Tiongkok	8.942.552.166
16	PT. FLAMINDO CARPETAMA	Kp.Cisantri Rt.01/01 Ds.Cilandak	Hongkong, Rrt	1.789.499.237
17	PT. FUTO CEMERLANG INDUSTRI	Kawasan Industri Samudra Buana Texindo Blok H Nomor 1, Gedung A	R.R. Tiongkok	92.519.429
18	PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC	Jl. Hegarmanah No.5	Korea Selatan	1.975.520.382
19	PT. HAE INDO CHEMICAL	Kp Cintakarya Blok Karang	Korea Selatan	150.843.000
20	PT. HANJIN INSOLE INDONESIA	Kp. Karajan	Korea Selatan	676.049.748

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
21	PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA	Wisma Indomobil Ii Jl. Mt Haryono Kav.9	Jepang	130.407.323.407
22	PT. HONG MAO HUMANRESOURCE INDONESIA	Kp Gunung Sembung	R.R. Tiongkok	10.500.004
23	PT. HS APPAREL	Kampung Cisantri	Korea Selatan	6.000.002
24	PT. HUAYINI ECONOMIC AND TRADEE INDUSTRY	Jl.Deso Cinangka	R.R. Tiongkok	15.500.000.000
25	PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY	Jl. Raya Cikampek - Purwakarta	R.R. Tiongkok	2.774.004.205
26	PT. ILUVA INDORECYCLE INDUSTRY	Jalan Tawakal Ujung Nomor 1	R.R. Tiongkok	683.358.632
27	PT. INDOAGRI DAITOCACAO	Kawasan Industri Kota Bukit Indah H-Ii No. 1	Jepang	1.891.498.930
28	PT. INDO-BHARAT RAYON	Menara Batavia Lt.16 Jl Kh. Mas Mansyur Kav.126 Karet Tengsin,Tanah Abang	Hongkong, Rrt	88.031.995.236
29	PT. INDONESIA SIMON	Jl. Bukit Akasia Vii Blok A-Iii No. 15a, Kawasan Industri Kota Bukit Indah, 41183	Jepang	40.000.000
30	PT. INDONESIA VICTORY GARMENT	Kp. Cisantri Rt 010 Rw 001 Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta	Taiwan	147.318.607
31	PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.	Gedung Wisma Indocement Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi	Singapura	320.031.877.280
32	PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY,TBK.	Wisma Indosemen 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910	Singapura	151.263.321.805
33	PT. INDORAMA POLYCHEM INDONESIA	Desa Kembang Kuning	Belanda	6.148.966.471
34	PT. INDOTAISEI INDAH DEVELOPMENT	Kawasan Industri Indotaisei, Sektor Ia Blok B	Jepang	112.400.011
35	PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS	Kampung Conggeang, Rt 017, Rw 005, Desa Cilangkap	R.R. Tiongkok	274.500.109
36	PT. JEMINA INTERNATIONAL	Kp.Cibodas	Korea Selatan	41.749.988

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
37	PT. JINTER INDONESIA JAYA	Kawasan Industri Sumber Karja Internasional, Jalan Raya Purwakarta - Bandung Km 8, Kp.Citapen	R.R. Tiongkok	18.000.006
38	PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA	Jl. Tol Jakarta Cikampek Km 0 800	R.R. Tiongkok	662.565.263.812
39	PT. KEUM SU TECH	Jl.Jababeka Xi A Blok K No.7 D, Kawasan Industri Jababeka	Korea Selatan	1.026.000.409
40	PT. KING GLOBAL METALINDO	Kampung Galayah	R.R. Tiongkok	215.849.993
41	PT. KINUGAWA INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok Aii,Lot.9b	Jepang	3.163.351.580
42	PT. KOIN MULTI STAR	Plaza Kebon Jeruk Blok D No.7,Jl.Raya Perjuangan	Korea Selatan	1.000.000.000
43	PT. KOMATSU BANE INDONESIA	Jl. Bukit Akasia Vii Kawasan Kota Bukit Indah St-5 No. 16/G Blok A-Iii	Jepang	52.499.968
44	PT. KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A li No.2	Jepang	2.038.089.384
45	PT. KYOKUTO INDOMOBIL MANUFACTURING INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok D Iii No.1	Jepang	2.929.586.282
46	PT. LEONG AYAMSATU PRIMADONA	Komplek Golden Plaza Blok G 20-22, Jl.Rs. Fatmawati No. 15,	Malaysia	2.066.956.378
47	PT. LIEN MAOYI INDONESIA	Jalan Terusan Kapten Halim	R.R. Tiongkok	2.116.599.000
48	PT. LION METAL WORKS	Jl Raya Bekasi Km 24,5	Singapura	3.669.806.750
49	PT. MALINDO FEEDMILL	Komplek Golden Plaza Blok G No. 17-22, Jl. Rs. Fatmawati No. 15	Singapura	6.225.430.453
50	PT. MAS FORTUNA INDUSTRI	Kampung Cinta Karya/ Cilegok	R.R. Tiongkok	16.500.004
51	PT. MEGABOX KARUNIA ABADI	Jl. Desa Cinangka	Korea Selatan	21.139.126.418
52	PT. METRO PEARL INDONESIA	Jl. Pramuka Raya Km 0,99 No. 18	Samoa Amerika	328.049.453.701
53	PT. MILANO DESIGN CONCEPT INDONESIA	Kp Citapen	Korea Selatan	615.617.390

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
54	PT. MITRA BEBEK PERSADA	Komplek Golden Plaza Blok G 17-19, Jl. Rs. Fatmawati No.15	Singapura	24.650.192.300
55	PT. MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA	Blok D Iii No.3, Kawasan Industri Kota Bukit Indah	Jepang	972.000.221
56	PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA	Jl. Jababeka, Sfb Blok V 86 A-B, Cikarang Industrial Estate	Jepang	4.298.997.392
57	PT. MOOF INDONESIA	Kp Sukamukti	Malaysia	5.999.996
58	PT. NAGATA OPTO WORKS INDONESIA	Kawasan Berikat Pt Besland Pertiwi, Blok A-Ii No.29, St4k & L Kota Bukit Indah, Desa Dangdeur, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181	Jepang	11.000.408.238
59	PT. NAXIS LABEL INDONESIA	Kawasan Berikat Pt. Besland Pertiwi Block A-Ii No. 29 St1-I Kota Bukit Indah	Hongkong, Rrt	399.399.773
60	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	Jl.Ancol Barat I/A5/C Nomor 10	Hongkong, Rrt	29.906.946.682
61	PT. NOROO AUTOMOTIVE PAINT INDONESIA	Jalan Raya Sadang Subang, Kampung Mekarjaya	Korea Selatan	704.586.018
62	PT. OLIVE PURWA ABADI	Kawasan Industri Sumber Karja International Jalan Purwakarta - Bandung Nomor 8 Kampung Citapen	Korea Selatan	3.000.001.195
63	PT. ONGPIN JAYA INDONESIA	Kampung Nagrog, Rt. 004/ Rw. 02, Kertamukti, Campaka	Taiwan	1.500.000.340
64	PT. PRESHION ENGPLAS	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok D.Ii Nomor 26	Singapura	8.670.985.895
65	PT. PSN ENAM INDONESIA	Kantor Taman A9 Unit A5, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.9/A9, Kawasan Mega Kuningan	Malaysia	171.000.068
66	PT. PURINUSA EKAPERSADA	Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 9, Jl. Mh. Thamrin No. 51	Mauritius	1.362.000.082
67	PT. PURNAMA ASIH SUR	Kp. Cipeuteuy	Korea Selatan	1.858.499.967
68	PT. SAMCON	Jl. Raya Subang Kp. Kiara Dua Rt. 002 Rw. 001	Korea Selatan	10.463.671.988
69	PT. SAMWHA INDONESIA	Kp. Cikananga	Korea Selatan	424.755.566

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
70	PT. SANWA MUSEN INDONESIA	Kawasan Berikat Pt. Besland Pertiwi, Blok A-Ii No. 29 St-4 G,H, Kota Bukit Indah, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta	Jepang	355.500.142
71	PT. SH GARMENT	Jl. Kampung Cijunti Blok 05	Korea Selatan	356.999.783
72	PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE	Sampoerna S. Square Jl Sudirman Kav 45-46	Austria	628.407.572.564
73	PT. SRIBOGA MARUGAME INDONESIA	Gd. Mustika Ratu, Lt.8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.74-74, Menteng Dalam	Amerika Serikat	166.281.286
74	PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	Kp. Nagrog	Korea Selatan	17.779.235.864
75	PT. STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI	Jl. Pemuda No.142	Singapura	52.367.996.768
76	PT. SUKWANG INDONESIA	Jl. Raya Cikopo Km.2	Korea Selatan	31.974.009.996
77	PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	Gedung Midplaza 2 Lt.8, Jl.Jend.Sudirman Kav.10-11	Jepang	92.505.022
78	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1 Lantai 1-23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52	Singapura	1.293.000.293
79	TONG WEI INDONESIA	Jl. Raya Sadang-Subang, Kp. Paldalapan	Singapura	778.584.220
80	PT. TOTOKU INDONESIA	Kawasan Berikat Pt. Besland Pertiwi, Blok A-Ii No.29 St-4 I&J, Kota Bukit Indah	Jepang	377.034.873
81	PT. TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER	Kawasan Industri Mm-2100, Blok Kk-8	Jepang	12.500.000
82	PT. UNIPRES INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok.D-Iv No.10	Jepang	4.033.903.689
83	PT. UNIVANCE INDONESIA	Kota Bukit Indah Blok D-Ii No. 16-19	Jepang	12.820.402.402
84	PT. URASE PRIMA	Cibinong, Ubrug , Jatiluhur ,Purwakarta	Jepang	154.500.035
85	UTAMAYURIM INDAH	Kampung Karang Mulya Rt.01/Rw.01, Desa Cibodas	Korea Selatan	6.871.503.885
86	PT. VALEO AC INDONESIA	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Jl. Bukit Nagasari Ii Blok N.1 No.15-16	Perancis	4.886.771.480

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Rp.)
87	PT. WARRENTY INDUSTRIES	Kp. Sukamukti	Malaysia	1.687.946.819
88	PT. WIN TEXTILE	Jalan Ir. H. Juanda	Korea Selatan	48.681.183.178
89	PT. XL AXIATA	Xl Axiata Tower Jl. Hr Rasuna Said Blok X-5 Kav 11-12, Rt. 007/Rw. 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi	Malaysia	10.499.994
90	PT. YC TEC INDONESIA	Kp.Cisantri Rt.02 Rw.01, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu	Korea Selatan	7.450.415.064
91	PT. YICHAO TEXTILE INDONESIA	Jalan Ubrug	Samoa Barat	3.887.000.545
92	PT. ZEUS KIMIATAMA INDONESIA	Jl Sungkai Delta Silicon V Lippo Cikarang Blok F25 No 091a, Delta Silicon V Lippo Cikarang	Singapura	11.059.495.788
JUMLAH				3.307.840.261.549

JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

413 Perusahaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
1	ACE HARDWARE INDONESIA	0	3	76.400.000,00
2	ADIENT AUTOMOTIVE INDONESIA	0	6	13.864.503.142,62
3	ADIT KORIN WORLD	0	0	-
4	AGROBIS PANCA EKATAMA	0	0	153.369.250,00
5	AKUR PRATAMA	0	84	59.401.555.000,00
6	ALAM JAYA MANDIRI	0	0	-
7	ALEXANDRA NUSANTARA PEMBANGUNAN	0	8	20.120.000.000,00
8	ALGHA BOEMI RAYA	0	0	12.905.000.000,00
9	ALHAMRA PUTRA MANDIRI	0	20	306.000.000,00
10	ALLIN PUTRA JAYA	0	0	3.751.000.000,00
11	ANDI UTAMA	0	0	10.367.830.000,00
12	ANEKA PETROINDO RAYA	0	1	14.530.503.293,58
13	ANUGERAH INDOFOOD BAROKAH MAKMUR	0	0	-
14	ANYAR RETAIL INDONESIA	0	4	170.000.000,00
15	APLIKANUSA LINTASARTA	0	0	10.000.000,00
16	ARISTA JAYA LESTARI	0	7	97.508.421,00
17	ARISTA MITRA LESTARI	0	5	57.550.000,00
18	ARITA PRIMA INDONESIA TBK	0	0	-
19	ARTA BOGA CEMERLANG	0	3	-
20	ARTHA MULIA BETON	0	2	24.669.020.824,00
21	ARUNA HIJAU POWER	0	0	407.253.282.048,30
22	ASIH EKA ABADI	0	0	-
23	ASPUTRA PERKASA MAKMUR	0	0	-
24	ASRI MEDICAL CENTRE	0	340	4.511.169.734,00
25	ASRI PELANGI NUSA	0	22	283.586.300.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
26	ASSA PAPER	0	2	-
27	ASTHA ERA ABADI	0	0	-
28	ASTRA INTERNATIONAL	0	20	91.350.000,00
29	ASTRA OTOPARTS	0	6	-
30	ASTRA OTOPARTS TBK.	0	10	144.800.000,00
31	AUTO CIPTA KARYA	0	0	-
32	AUTOTECH INDONESIA	0	2	6.552.608.776,43
33	BAHTERA ADI WIJAYA	0	0	247.000.000,00
34	BANGUN INDOPRALON SUKSES	0	0	-
35	BANSHU ELECTRIC INDONESIA	0	0	8.050.503.205,45
36	BARIS FIKRI MULIA INDUSTRIES	0	23	92.600.000,00
37	BASKARA CIPTA PRATAMA	0	4	-
38	BATU CEMERLANG ANDALAN	0	0	-
39	BENTARA KARYA MULIA	0	0	-
40	BERKAH ALZICO ANTALATIKA	0	0	200.000.000,00
41	BERKAH DOA MULTAZAM	0	79	1.604.049.181,00
42	BERKAH ISYANDRA INDONESIA	0	27	1.044.201.965,00
43	BERLIAN CAHAYA INDAH	0	16	6.017.185.578,00
44	BERSAMA DAUKY MULYA	0	1	24.711.930,00
45	BERSAMA ZATTA MULYA	0	5	22.000.000,00
46	BESLAND PERTIWI	0	0	3.068.722.973,00
47	BIO INDUSTRI NUSANTARA	0	11	66.558.300,00
48	BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO	0	38	6.376.297.255,00
49	BONGMAN INTERNATIONAL	0	0	136.499.917,19
50	BOUNTY SEGAR INDONESIA	0	48	2.787.889.208,40
51	BUKIT INDAH MANDIRI ABADI	0	0	-
52	BUKIT INTI MAKMUR ABADI	0	6	397.095.497,00
53	BUMI BERKAH BOGA	0	14	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
54	BUMI CIBARUSAH INDAH	0	0	1.382.400.000,00
55	CARAKA ANUGRAH SANTOSO	0	1	488.600.000,00
56	CENGKARENG PERMAI	0	0	1.329.631.000,00
57	CHANDRA KEMAS ABADI	0	12	2.329.500.000,00
58	CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	0	0	-
59	CHEMSTAR INDONESIA	0	5	2.965.500.000,00
60	CILEUNCA SUMBER REZEKI	0	22	7.859.500.000,00
61	CIOMAS ADISATWA	0	462	293.200.000,00
62	CIPTA NIAGA SEMESTA	0	14	679.000.000,00
63	CIPTA RAYA DATA MAKMUR	0	3	1.000.000.000,00
64	CISANGKAN	0	133	3.910.000.000,00
65	CITRA ASIA RAYA	0	0	256.500.037,65
66	CITRA LAKSANA	0	5	255.000.000,00
67	CITRADUTA SUKSES SEMESTA	0	0	17.488.467.331,00
68	CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI	0	0	500.000.000,00
69	CLAMA INDONESIA	4	6	13.957.338.606,95
70	COCO CARBON INDONESIA	0	0	-
71	CONBLOC INTERNUSA	0	0	1.547.700.000,00
72	DAESANG INTERNATIONAL	0	0	-
73	DASA GRAHA JAYA	0	0	-
74	DAWOO INTERNATIONAL	0	0	116.026.042,56
75	DAYA ANUGRAH MANDIRI	0	0	149.857.577,00
76	DAYA ANUGRAH MULYA	0	137	38.154.900.000,00
77	DAYA INDAH YASA	0	0	44.603.820,00
78	DAYA PRIMA LESTARI	0	0	-
79	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	0	0	-
80	DELAMETA BILANO	0	232	2.881.500.000,00
81	DELAPAN BINTANG	0	38	6.837.100.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
82	DOM PIZZA INDONESIA	0	0	49.878.656,11
83	DONG YANG ILLUSTR INDONESIA	0	35	92.499.996,17
84	DRAGON PRODUCT INDONESIA	0	4	-
85	DUNIA DAGING FOOD INDUSTRIES	0	2	-
86	DUNKINDO LESTARI	0	0	23.549.320,00
87	EAST WEST SEED INDONESIA	0	34	137.244.639.776,41
88	ECOLE JAYA INDONESIA	0	6	8.061.000.000,00
89	EINS TREND	0	2	-
90	EKA MAS REPUBLIK	0	0	5.000.000,00
91	EKANATHA ALAM SEGAR	0	0	49.431.470.000,00
92	ELECTRONIC CITY INDONESIA TBK	0	0	-
93	ELMER KARYA SEJAHTERA	0	0	81.000.000,00
94	EPID MENARA ASSETCO	0	0	52.517.385,00
95	ERA INDUSTRI OTOMOTIF	0	0	-
96	ERINAKA PERDANA	0	1	672.000.000,00
97	EXCEL TECHNO LESTARI	0	0	295.000.000.000,00
98	EXELLY ELEKTRIK INDONESIA	0	0	1.600.000.000,00
99	EXINDOKARSA AGUNG	0	0	50.400.000,00
100	FAST FOOD INDONESIA Tbk.	0	4	438.737.941,00
101	FD INDUSTRI INDONESIA	0	0	-
102	FEI TEXTILE INDUSTRIES	0	89	8.942.552.165,63
103	FLAMINDO CARPETAMA	0	0	1.789.499.236,54
104	FONERCO	0	0	-
105	FOODS BEVERAGES INDONESIA	0	0	-
106	FORINDO MITRA UTAMA	0	0	34.000.000,00
107	FORTUNA KARYA PERSADA	0	4	11.522.000.000,00
108	FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING	0	0	-
109	FUTO CEMERLANG INDUSTRI	0	2	92.519.428,75

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
110	GALLIARIA PROSPERA ETERNA	0	0	-
111	GAYA HIDUP MASA KINI	0	5	16.300.000,00
112	GEELY MOTOR INDONESIA	0	0	-
113	GENERAL CHEM	0	0	-
114	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0	0	-
115	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TARKA)	0	0	272.000.000,00
116	GISTEX	0	87	2.621.072.481,00
117	GISTEX CHEWON SYNTHETIC	0	83	1.975.520.382,31
118	GLOBAL PANGAN ABADI	0	9	17.886.400.000,00
119	GLOBAL TEKNIK AGRONUSA	0	1	509.975.000,00
120	GOLDEN MAKMUR INDONESIA	0	6	4.265.000.000,00
121	GRAHA BARA LESTARI	0	0	50.000.000,00
122	GRAHA LAYAR PRIMA	0	30	67.053.363,00
123	GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk	0	0	13.600.000,00
124	GRANADA MITRA BERSAMA	0	0	2,00
125	GRIYA PRATAMA	0	0	-
126	GRIYA PRATAMA (BRATAYUDA)	0	91	-
127	GUNUNG KECAPI	0	81	5.556.333.779,00
128	GUNUNG PATAPPAAN ABADI	0	0	267.900.000,00
129	HAE INDO CHEMICAL	0	1	150.843.000,00
130	HANDAL INDONESIA MOTOR	0	0	877.224.454.327,00
131	HANJIN INSOLE INDONESIA	0	187	676.049.747,93
132	HANNAH ANGELINA TAMA	0	0	31.699.900.000,00
133	HANNY AGUSTINA	0	0	5.022.000.000,00
134	HANS ENJINIRING DAN KONSTRUKSI	0	0	-
135	HANS JAYA UTAMA	0	0	-
136	HARITAGE CAKRA PROPERTINDO	0	0	38.700.000.000,00
137	HARMONI MITRAJAYA	0	0	183.000.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
138	HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA	4	209	130.407.323.406,56
139	HOLISTIC INDONESIA	0	167	4.201.700.000,00
140	HONG MAO HUMANRESOURCE INDONESIA	0	0	10.500.004,18
141	HS APPAREL	0	0	6.000.002,39
142	HUAYINI ECONOMIC AND TRADEE INDUSTRY	0	0	15.500.000.000,00
143	HUSADA PURWAKARTA	0	5	-
144	ICL VALVE GLOBAL	0	1	-
145	IFORTE SOLUSI INFOTEK	0	0	-
146	ILUVA GRAVURE INDUSTRY	0	8	2.774.004.205,01
147	ILUVA INDORECYCLE INDUSTRY	0	16	683.358.632,36
148	INDACHI PRIMA	0	10	840.500.000,00
149	INDACO WARNA DUNIA	0	0	-
150	INDISI	0	0	-
151	INDO HUSADA UTAMA	0	42	776.505.284,00
152	INDO MINERAL RESEARCH	0	23	95.600.000,00
153	INDO SADANG FABRIKATOR	0	0	-
154	INDOAGRI DAITOCACAO	0	0	1.891.498.929,99
155	INDO-BHARAT RAYON	0	0	88.031.995.236,32
156	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	0	142	169.481.978.685,00
157	INDOHOTAMA SEJATI	0	0	-
158	INDOMARCO PRISMATAMA	0	0	1.703.700.000,00
159	INDOMOBIL PRIMA ENERGI	0	0	-
160	INDONESIA HWALIN KNITTING	0	0	-
161	INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM	0	0	-
162	INDONESIA SIMON	0	8	40.000.000,00
163	INDONESIA VICTORY GARMENT	0	124	147.318.606,80
164	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.	0	0	320.031.877.280,28
165	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY,TBK.	0	27	151.263.321.805,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
166	INDORAMA POLYCHEM INDONESIA	0	0	6.148.966.471,32
167	INDO-RAMA SYNTHETICS	0	0	101.658.678.894,00
168	INDORAMA TRADE AND DEVELOPMENT SERVICES	0	0	-
169	INDOROTI PRIMA CEMERLANG	0	0	-
170	INDOSAT	0	0	-
171	INDOTAISEI INDAH DEVELOPMENT	0	0	112.400.011,45
172	INDOTAMA FERRO ALLOYS	0	0	274.500.109,30
173	INDOWISATA TEJA MAHATAMA	0	0	93.000.000,00
174	INNO INDONESIA RUBBER	0	0	-
175	INNOVATE MAS INDONESIA	0	0	2.000.000,00
176	INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM	0	0	-
177	INTERNASIONAL MULTI JAYA LOGAM	0	0	-
178	INTERNASIONAL MULTI JAYA TEKINDO	0	0	-
179	IR.HAMONG WARDOJO	0	0	4.605.000.000,00
180	IRAMA UNGGUL	0	0	-
181	JAGAD DUA PUTRA	0	0	124.418.000.000,00
182	JAKATIJAYA MEGAH	0	0	350.000.000,00
183	JANANI BUMI RESOR	0	0	531.100.000,00
184	JAPFA COMFEED INDONESIA	0	1	-
185	JASAMARGA JAPEK SELATAN	0	0	957.749.900.000,00
186	JASAMARGA PROPERTI	0	0	-
187	JAYA BETON INDONESIA	0	5	1.511.200.000,00
188	JAYATAMA NUSAPERSADA	0	0	-
189	JCO DONUT & COFFEE	0	0	545.500.000,00
190	JEMINA INTERNATIONAL	0	0	41.749.988,08
191	JINTER INDONESIA JAYA	0	5	18.000.005,62
192	JIYOUNG METAL INDONESIA	0	0	-
193	JUN INTERNATIONAL INDONESIA	0	0	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
194	K & I INTERNATIONAL INDONESIA	0	12	-
195	KARYA MITRA INDORAMA	0	0	1.823.900.000,00
196	KARYA SEJAHTERA LESTARI	0	0	300.000.000,00
197	KENCANA WIRAUTAMA SAKTI	0	5	1.600.000.000,00
198	KERETA CEPAT INDONESIA CHINA	0	0	662.565.263.811,89
199	KEUM SU TECH	0	0	1.026.000.408,52
200	KHABAMARA SEMESTA RAYA	0	10	21.810.000.000,00
201	KHARISMA ANDALAN MANDIRI	0	0	-
202	KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	0	0	1.079.100.000,00
203	KINERJA MUTIARA PERSADA	0	0	151.200.000,00
204	KING GLOBAL METALINDO	0	10	215.849.992,87
205	KINUGAWA INDONESIA	5	0	3.163.351.579,52
206	KOIN MULTI STAR	0	0	1.000.000.000,00
207	KOIN PRATAMA	0	0	-
208	KOIN PRIMA INDONESIA	1	0	-
209	KOMATSU BANE INDONESIA	0	2	52.499.968,15
210	KOMELT AIR ENGINEERING	0	0	26.751.000,00
211	KOREA TEXTILE INDONESIA	0	0	-
212	KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES	2	2	2.038.089.384,05
213	KRIDA BANGUN PERSADA	0	0	63.124.872.850,00
214	KRIDA RAGAM INTEGRA SOLUSI	0	0	222.200.000,00
215	KYOKUTO INDOMOBIL MANUFACTURING INDONESIA	0	2	2.929.586.282,28
216	LAN SENA JAYA	0	0	22.761.400.000,00
217	LANCAR WIGUNA SEJAHTERA	0	0	188.000.000,00
218	LANGKAH HIDUP BARU	0	0	116.100.000,00
219	LEMBU JANTAN PERKASA	0	3	76.990.043.000,00
220	LEONG AYAMSATU PRIMADONA	0	0	2.066.956.378,35
221	LIEN MAOYI INDONESIA	2	29	2.116.599.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
222	LINK NET TBK	0	0	6.960.600.000,00
223	LINTAS BENUA LAND	0	0	6.435.000.000,00
224	LION METAL WORKS	0	1	3.669.806.749,92
225	MAKMUR ABADI VALVE	0	0	41.319.200.000,00
226	MAKO ANUGERAH KREASINDO	0	0	166.000.000,00
227	MALINDO FEEDMILL	0	0	6.225.430.452,81
228	MANDIRI SEJAHTERA SENTRA	0	81	8.627.000.000,00
229	MANGLAYANG BERKAH SEJAHTERA	0	0	7.869.000,00
230	MAS FORTUNA INDUSTRI	0	1	16.500.003,74
231	MATAHARI PUTRA PRIMA	0	0	4.000.000,00
232	MATALA REALTY DEVELOPMENT	0	0	25.479.000.000,00
233	MAXX COFFEE PRIMA	0	4	429.960.432,00
234	MEGA AKSES PERSADA	0	0	889.400.000,00
235	MEGA DAYA TEKNOLOGI	0	1	41.000.000,00
236	MEGABOX KARUNIA ABADI	0	3	21.139.126.418,00
237	MEGAH GEMILANG STEEL	0	0	2.696.400.000,00
238	MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA	0	0	16.868.380.631,00
239	METRO INTI PURNAMA	0	0	-
240	METRO PEARL INDONESIA	28	2339	328.049.453.701,49
241	MILANO DESIGN CONCEPT INDONESIA	2	2	615.617.390,16
242	MILLENNIUM KNITTING	0	0	165.257.550,00
243	MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK	0	77	236.200.000,00
244	MINISO INTERNASIONAL COMPANI	0	0	1.000.000,00
245	MITRA BEBEK PERSADA	0	0	24.650.192.300,00
246	MITRA JAYA SAKTI SENTOSA	0	2	-
247	MITRA NIAGA MADANI	0	0	-
248	MITRA TANGGUH UTAMA	0	0	36.589.311,00
249	MITRA TATA GEMILANG	0	0	53.621.000.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
250	MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA	0	26	972.000.221,26
251	MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA	0	3	4.298.997.391,94
252	MOOF INDONESIA	0	0	5.999.996,36
253	MUKTI MANDIRI LESTARI	0	0	82.000.000,00
254	MULTI ADHI PERKASA	0	0	100.000,00
255	MULTI OPTIMAL SENTOSA	0	0	197.552.471.879,00
256	MULTI SARANA PAKANINDO	0	0	20.110.600.000,00
257	MULTI WARNA KARPETINDO AGUNG	0	18	-
258	MULTIRASA NUSANTARA	0	0	564.634.067,00
259	MUSTIKA CITRA RASA	0	4	-
260	MUTIARA INTER BUANA	0	0	2.319.852.736,00
261	NAGATA OPTO WORKS INDONESIA	2	9	11.000.408.237,68
262	NASINDOSEJAHTERA CEMERLANG	0	3	28.000.000.000,00
263	NATIONAL ASSEMBLERS	0	154	76.445.753.640,00
264	NAXIS LABEL INDONESIA	0	0	399.399.772,50
265	NEWARK ENGINEERING INDONESIA	0	7	6.905.000.000,00
266	NIAGATAMA KENCANA	0	3	509.073.000,00
267	NIPPON INDOSARI CORPINDO	0	0	-
268	NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	0	38	29.906.946.682,29
269	NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA	0	0	-
270	NISSAN MOTOR INDONESIA	0	0	-
271	NOROO AUTOMOTIVE PAINT INDONESIA	0	0	704.586.017,84
272	NOVINDO AGRITECH HUTAMA	0	0	3.000.000,00
273	NURAGUNG JAYA	0	0	25.000.000,00
274	OKAMOTO LOGISTICS NUSANTARA	0	0	-
275	OLIVE PURWA ABADI	1	100	3.000.001.194,50
276	ONGPIN JAYA INDONESIA	0	2	1.500.000.340,00
277	OUTDOOR FOOTWEAR NETWORKS	0	0	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
278	PACIFIC	0	0	-
279	PANCA BUDI LOGISTINDO	0	0	106.309.000.000,00
280	PANENARTA NIAGA PERSADA	0	1	111.151.500.000,00
281	PC 24 CYBER INDONESIA	0	0	-
282	PELANGI BUNGA LESTARI	0	0	72.400.000.000,00
283	PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL	0	0	368.144.000,00
284	PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBAN	0	57	350.000.000,00
285	PEMBANGUNAN RUMAH NASIONAL (PERUMNAS)	0	0	164.900.000,00
286	PENJALINDO NUSANTARA	0	23	1.174.970.165,00
287	PERHUTANI	0	0	-
288	PERKASA INDONESIA LESTARI	0	0	-
289	PERKEBUNAN NUSANTARA I	0	0	2.429.600.000,00
290	PERSADA SOKKA TAMA	0	0	431.095.540,00
291	PERUSAHAAN GAS NEGARA	0	0	-
292	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	0	0	720.016.396,00
293	PESONA NATASHA GEMILANG	0	2	215.079.123,00
294	PESTA PORA ABADI	0	27	47.000.000,00
295	PILAR SINERGI BUMN INDONESIA	0	0	-
296	PLN NUSANTARA POWER	0	0	60.661.908.070,00
297	POLY FRAME GLOBAL	0	0	-
298	PORI HAERA ABADI	0	2	3.500.000.000,00
299	PRABU AGRO MANDIRI	0	91	4.389.000.000,00
300	PRECIOUS INDONESIA	0	0	-
301	PRESHION ENGPLAS	0	9	8.670.985.894,52
302	PRIMA ILJO	0	0	-
303	PRIMAJASA TUNAS MANDIRI	0	0	-
304	PRODIA WIDYAHUSADA	0	0	9.652.250,00
305	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	0	0	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
306	PROGRESS DIECAST	0	0	-
307	PROPERTINDO KREASI UTAMA	0	1	10.796.761.000,00
308	PSN ENAM INDONESIA	0	0	171.000.068,09
309	PT. KERETA API INDONESIA	0	0	-
310	PURINUSA EKAPERSADA	0	0	1.362.000.084,47
311	PURNAMA ASIH SUR	0	100	1.858.499.966,88
312	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA	0	0	4.811.364.991,00
313	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA PAMOYANAN	0	0	759.708.676,00
314	PURWAKARTA TELEVISINDO	0	1	2.034.217.929,00
315	PUTERA MARWAH BERSAUDARA	0	0	472.199.800,00
316	PUTRA CITARUM REALTINDO	0	0	9.920.710.000,00
317	PUTRA NAGA INDOTAMA	0	0	17.480.300.000,00
318	QUTY KARUNIA	0	610	-
319	RAFLESIANA MEDIKA PERDANA	0	0	560.000.000,00
320	RAMAYANA LESTARI SENTOSA	0	0	4.323.600.000,00
321	REKSO NASIONAL FOOD	0	0	3.873.700.000,00
322	REMALA ABADI	0	0	-
323	RENERPHA ENERGI UTAMA	0	0	-
324	RESKA MULTI USAHA	0	0	3.000.000,00
325	RESTU MAHKOTA KARYA	0	0	42.300.000,00
326	RICHEESE KULINER INDONESIA	0	0	-
327	RIZKI ANUGRAH MANDIRI	0	0	1.065.000.000,00
328	SADANG TERMINAL SQUARE	0	4	-
329	SAHARA MULTI HIJAU	0	0	106.162.747.400,00
330	SALAEURIH MUDA PERKASA	0	0	519.380.870,00
331	SAMCON	0	4	10.463.671.987,65
332	SAMUDRA BUANA TEXINDO	0	6	37.832.100.000,00
333	SAMWHA INDONESIA	0	1	424.755.566,39

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
334	SAN FU INDONESIA	0	0	-
335	SANWA MUSEN INDONESIA	0	0	355.500.141,55
336	SARANA DEPO KENCANA	0	0	-
337	SARI BURGER INDONESIA	0	0	-
338	SARI COFFEE INDONESIA	0	12	1.207.373.481,00
339	SARIMELATI KENCANA	0	0	68.354.487,00
340	SAYAP MAS UTAMA	0	0	2.550.233.500,00
341	SEJUK SENTOSA LESTARI	0	0	-
342	SELO AGUNG	0	0	1.850.000.000,00
343	SEPATU BATA	0	0	-
344	SEYON INDONESIA	0	0	-
345	SH GARMENT	0	0	356.999.783,42
346	SHARIA GREEN LAND	0	4	8.990.000.000,00
347	SIDARTA BUMI PRATIWI	0	1	3.010.000.000,00
348	SINAR SERVIS INDONESIA	0	1	3.700.000.000,00
349	SINAR SUKSES MANDIRI	0	14	35.731.000.000,00
350	SINARNIAGA SEJAHTERA	0	0	3.085.445.226,00
351	SINGA PURWAKARTA JAYA	0	0	-
352	SKY FOAM	0	6	-
353	SKYLINE GROUP INDONESIA	0	0	-
354	SOUTH PACIFIC VISCOSE	0	0	628.407.572.564,18
355	SRIBOGA MARUGAME INDONESIA	0	0	166.281.286,38
356	STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	0	62	17.779.235.863,58
357	STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI	0	3	52.367.996.767,53
358	SUKWANG INDONESIA	0	447	31.974.009.996,17
359	SULZER INDONESIA	0	0	-
360	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	0	0	879.600.001,00
361	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	0	0	14.900.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
362	SUMBER KARJA INTERNASIONAL	0	0	3.100.000.000,00
363	SUMI INDO WIRING SYSTEMS	0	0	-
364	SUPER UNGGAS JAYA	0	0	-
365	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	0	0	92.505.022,10
366	SURGANYA MOTOR INDONESIA	0	22	201.127.735,00
367	SURI TANI PEMUKA	0	0	97.730.061.451,00
368	TANIKAYA MULTI AGRO	0	0	200.000.000,00
369	TATA GRIYA SARANA	0	0	135.435.800.000,00
370	TATA METAL LESTARI	0	2	1.326.644.302,00
371	TATALOGAM LESTARI	0	0	149.925.000,00
372	TATSUMI INDONESIA	0	0	-
373	TEGUH ANINDYAGUNA	0	0	2.059.650.409,00
374	TEKNOLOGI MINERAL BATUBARA	0	0	500.000.000,00
375	TEKSTIL BANGKIT KEMBALI	0	3	-
376	TELEKOMUNIKASI SELULAR	0	0	1.293.000.293,08
377	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk.	0	0	617.300.000,00
378	TEXFIBRE INDONESIA	0	0	-
379	TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	0	0	2.325.557.482,00
380	TIRTAKENCANA TATAWARNA	0	12	843.893.594,00
381	TITIAN PERSADA	0	1	27.000.000,00
382	TON HADI	0	304	1.973.837.056,00
383	TONG WEI INDONESIA	1	27	778.584.220,28
384	TOTOKU INDONESIA	0	7	377.034.873,48
385	TOWER BERSAMA	0	0	11.000.000,00
386	TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER	0	0	12.500.000,00
387	TS TECH INDONESIA	1	0	-
388	TUJUH BINTANG MANDIRI	0	0	-
389	UNGGAS LESTARI UNGGUL	0	0	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI	JUMLAH INVESTASI
390	UNIPRES INDONESIA	0	2	4.033.903.689,00
391	UNIVANCE INDONESIA	0	31	12.820.402.402,31
392	URASE PRIMA	0	4	154.500.035,02
393	URIMESSING SECURITY GUARD SERVICE	0	0	400.000.000,00
394	UTAMAYURIM INDAH	0	3	6.871.503.885,30
395	VALEO AC INDONESIA	6	120	4.886.771.479,80
396	VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS	0	0	-
397	VELASTO INDONESIA	0	0	-
398	VIVI JUSTITIA	0	4	6.063.000.000,00
399	WARNA JAYA SENTOSA	0	0	30.100.000,00
400	WARRENTY INDUSTRIES	0	3	1.687.946.819,31
401	WASKITA BETON PRECAST Tbk.	0	0	-
402	WASTEC INTERNATIONAL	0	0	-
403	WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG	0	0	-
404	WIN TEXTILE	3	45	48.681.183.177,64
405	WIRA SANDI	0	3	16.200.000,00
406	XL AXIATA	0	10	10.499.993,63
407	YC TEC INDONESIA	10	1605	7.450.415.064,02
408	YICHAO TEXTILE INDONESIA	8	21	3.887.000.545,27
409	YONTOMO SUKSES ABADI	0	0	220.400.000,00
410	YUDHATARUNA MANUNGGALESEJATI	0	0	-
411	YUYUN KADARLIA	0	3	6.350.000.000,00
412	ZEIN BAHEERA	0	34	100.000.000,00
413	ZEUS KIMIATAMA INDONESIA	0	23	11.059.495.788,07
	TOTAL	80	10175	8.129.695.923.425,88

KENAIKAN / PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN

(Persen)

PMDN 2023 Rp. 7.284.959.600.000 sebanyak 155 Perusahaan

PMDN 2023 Rp. 4.821.855.661.877 sebanyak 201 Perusahaan

$$\begin{aligned}\text{Kenaikan / Penurunan} &= \frac{4.821.855.661.877 - 7.284.959.600.000}{7.284.959.600.000} \times 100 \\ &= (34 \%) \end{aligned}$$

REALISASI CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini	KINERJA	ANGGARAN	
Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal										
Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	32.696.000,00		2,00	29.539.600,00	100,00%	90,35%	IPro dan Vidio Promosi Investasi
	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	7,4	Triliun			34,70	-	468,92%		Data Olahan LKPM
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						-	-			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Promosi Investasi	1,00	14.945.600,00	100,00%	99,64%	Promosi IPro dan Vidio Promosi Investasi
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	17.696.000	Penyusunan Strategi Promosi oleh Tim Peningkatan Investasi Daerah	1,00	14.594.000,00	100,00%	82,47%	Penyusunan IPro

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta,

Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. H. Yadi Heryadi, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 31 Januari 2025

Pengampu Outcome Program

Arif Martanto, ST, MT
NIP. 19790306 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id

**NILAI MINAT INVESTASI BERDASARKAN LOKASI DAN SEKTOR (TRILIUN)
TAHUN 2024**

NO	SEKTOR	INVESTASI (Dalam Rp.)
1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.473.802.830.113,45
2	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1.150.678.104.390,15
3	Konstruksi	1.009.485.600.607,00
4	Industri Kimia Dan Farmasi	844.755.792.052,51
5	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	793.316.499.657,39
6	Industri Karet dan Plastik	611.976.343.602,38
7	Listrik, Gas dan Air	473.666.358.412,30
8	Industri Kertas dan Percetakan	358.084.926.456,97
9	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	342.223.447.012,73
10	Industri Tekstil	209.453.402.539,91
11	Perdagangan dan Reparasi	207.248.672.553,63
12	Industri Makanan	189.247.608.730,05
13	Tanaman Pangan dan Perkebunan	144.513.239.776,41
14	Jasa Lainnya	92.516.345.614,63
15	Peternakan	66.001.011.223,45
16	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	62.455.328.006,58
17	Industri Mineral Non Logam	31.187.167.331,00
18	Industri Lainnya	21.955.782.536,56
19	Pertambangan	18.133.333.779,00
20	Hotel dan Restoran	17.929.420.791,49
21	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	11.063.208.237,68
22	Perikanan	1.500.000,60
23	Industri Kayu	-
24	Kehutanan	-
JUMLAH		8.129.695.923.425,88

Grafik Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi Dan Sektor



REALISASI CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal										
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14	Persen	585.147.000,00		8,00	527.593.730,00	112,04%	90,16%	Data Pengawasan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	Pelaku Usaha	87.771.000	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	80,00	87.049.080,00	666,67%	99,18%	Forum Penyelesaian Masalah
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	351	Pelaku Usaha	321.832.000	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	420,00	319.216.650,00	119,66%	99,19%	Bimtek
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	22	Kegiatan Usaha	175.544.000	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan	35,00	121.328.000,00	159,09%	69,12%	Laporan Pengawasan

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta,

Hariman Budi Anggoro, ST.MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. H. Yadi Heryadi, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 31 Januari 2025

Pengampu Outcome Program

Kunto Adjie Wibowo, SP., M.Tr.A.P
NIP. 19790306 200604 1 006

**PERSENTASE PMA DAN PMDN
YANG DAPAT DIMONITORING SECARA BERKALA
TAHUN 2024**

NO	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL INVESTASI	TKA	TKI
1	KERETA CEPAT INDONESIA CHINA	11.374.529.418.117,00	0	0
2	SOUTH PACIFIC VISCOSE	2.600.980.857.794,00	0	0
3	INDO-RAMA SYNTHETICS	1.889.815.278.894,00	0	0
4	MULTI OPTIMAL SENTOSA	1.416.773.690.548,00	0	0
5	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.	1.152.918.873.263,00	0	0
6	HANDAL INDONESIA MOTOR	877.224.434.779,00	0	0
7	METRO PEARL INDONESIA	851.337.950.035,00	28	2339
8	PENJALINDO NUSANTARA	839.016.238.250,00	0	23
9	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY,TBK.	725.794.092.808,00	0	27
10	EKANATHA ALAM SEGAR	481.998.586.316,00	0	0
11	ALEXANDRA NUSANTARA PEMBANGUNAN	410.270.000.000,00	0	8
12	ARUNA HIJAU POWER	407.254.288.307,00	0	0
13	TATA METAL LESTARI	388.237.943.000,00	0	2
14	SINAR SUKSES MANDIRI	381.226.210.650,00	0	14
15	MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA	345.649.198.000,00	0	3
16	BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO	296.521.764.738,00	0	38
17	EXCEL TECHNO LESTARI	295.000.000.000,00	0	0
18	ASRI PELANGI NUSA	275.846.250.000,00	0	22
19	HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA	266.132.424.949,00	4	209
20	WASKITA BETON PRECAST Tbk.	264.932.694.117,00	0	0
21	EAST WEST SEED INDONESIA	248.851.679.403,00	0	34
22	BESLAND PERTIWI	244.131.067.088,00	0	0

23	CHANDRA KEMAS ABADI	240.319.054.867,00	0	12
24	CIOMAS ADISATWA	238.962.771.488,00	0	462
25	SURI TANI PEMUKA	193.530.215.598,00	0	0
26	MANDIRI SEJAHTERA SENTRA	192.161.943.849,00	0	81
27	INDO HUSADA UTAMA	189.386.287.342,00	0	42
28	STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	188.398.777.554,00	0	62
29	JAKATIJAYA MEGAH	179.892.675.371,00	0	0
30	STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI	170.197.699.311,00	0	3
31	BERLIAN CAHAYA INDAH	157.357.047.730,00	0	16
32	TONG WEI INDONESIA	156.863.304.726,00	1	27
33	ASRI MEDICAL CENTRE	145.840.455.085,00	0	340

Jumlah Perusahaan Lapor LKPM : 413 Perusahaan
Monitoring Berkala (terbesar -By Sistem) : 33 Perusahaan

REALISASI CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TWini	S/D TWini			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal										
PROGRAMPELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	18,5	Persen	135.000.000,00		34,76	119.257.530,00	185,84%	88,34%	Data LKPM, MPP Teras, SKM dan Sistem Perizinan
	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	94,58	Persen			97,00	-	102,56%		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92,5	Poin			96,50	-	104,32%		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600	Pelaku Usaha	85.000.000	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	800,00	80.444.550,00	133,33%	94,64%	Gebyar NIB 17 Kecamatan
Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	Pelaku Usaha	20.000.000	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	35,00	13.292.480,00	70,00%	66,46%	Laporan Pengaduan
Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200	Kegiatan Usaha	30.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	150,00	25.520.500,00	75,00%	85,07%	Data OSS, Gaspol

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta,

Hariman Budi Anggoro, ST.MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. H. Yadi Heryadi, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 31 Januari 2025

Pengampu Outcome Program

Metta Ratna Mustika, SE
NIP. 19830301 200501 2 009

DAYA SERAP TENAGA KERJA
TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
1	ACE HARDWARE INDONESIA	0	3
2	ADIENT AUTOMOTIVE INDONESIA	0	6
3	AGROBIS PANCA EKATAMA	0	0
4	AKUR PRATAMA	0	84
5	ALEXANDRA NUSANTARA PEMBANGUNAN	0	8
6	ALGHA BOEMI RAYA	0	0
7	ALHAMRA PUTRA MANDIRI	0	20
8	ANDI UTAMA	0	0
9	ANEKA PETROINDO RAYA	0	1
10	ANYAR RETAIL INDONESIA	0	4
11	APLIKANUSA LINTASARTA	0	0
12	ARISTA JAYA LESTARI	0	7
13	ARISTA MITRA LESTARI	0	5
14	ARTA BOGA CEMERLANG	0	3
15	ARTHA MULIA BETON	0	2
16	ARUNA HIJAU POWER	0	0
17	ASPUTRA PERKASA MAKMUR	0	0
18	ASRI MEDICAL CENTRE	0	340
19	ASRI PELANGI NUSA	0	22
20	ASSA PAPER	0	2
21	ASTRA INTERNATIONAL	0	20
22	ASTRA OTOPARTS	0	6
23	ASTRA OTOPARTS TBK.	0	10
24	AUTOTECH INDONESIA	0	2
25	BARIS FIKRI MULIA INDUSTRIES	0	23
26	BASKARA CIPTA PRATAMA	0	4
27	BERKAH ALZICO ANTALATIKA	0	0
28	BERKAH DOA MULTAZAM	0	79
29	BERKAH ISYANDRA INDONESIA	0	27
30	BERLIAN CAHAYA INDAH	0	16
31	BERSAMA DAUKY MULYA	0	1
32	BERSAMA ZATTA MULYA	0	5
33	BESLAND PERTIWI	0	0
34	BIO INDUSTRI NUSANTARA	0	11
35	BIOAXI MEDIKA HEALTHINDO	0	38
36	BONGMAN INTERNATIONAL	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
37	BOUNTY SEGAR INDONESIA	0	48
38	BUKIT INDAH MANDIRI ABADI	0	0
39	BUKIT INTI MAKMUR ABADI	0	6
40	BUMI BERKAH BOGA	0	14
41	CARAKA ANUGRAH SANTOSO	0	1
42	CENGKARENG PERMAI	0	0
43	CHANDRA KEMAS ABADI	0	12
44	CHEMSTAR INDONESIA	0	5
45	CILEUNCA SUMBER REZEKI	0	22
46	CIOMAS ADISATWA	0	462
47	CIPTA NIAGA SEMESTA	0	14
48	CIPTA RAYA DATA MAKMUR	0	3
49	CISANGKAN	0	133
50	CITRA LAKSANA	0	5
51	CITRADUTA SUKSES SEMESTA	0	0
52	CLAMA INDONESIA	4	6
53	CONBLOC INTERNUSA	0	0
54	DAWOO INTERNATIONAL	0	0
55	DAYA ANUGRAH MANDIRI	0	0
56	DAYA ANUGRAH MULYA	0	137
57	DAYA INDAH YASA	0	0
58	DAYA PRIMA LESTARI	0	0
59	DELAMETA BILANO	0	232
60	DELAPAN BINTANG	0	38
61	DOM PIZZA INDONESIA	0	0
62	DONG YANG ILLUSTRATION INDONESIA	0	35
63	DRAGON PRODUCT INDONESIA	0	4
64	DUNIA DAGING FOOD INDUSTRIES	0	2
65	DUNKINDO LESTARI	0	0
66	EAST WEST SEED INDONESIA	0	34
67	ECOLE JAYA INDONESIA	0	6
68	EINS TREND	0	2
69	EKANATHA ALAM SEGAR	0	0
70	ELECTRONIC CITY INDONESIA TBK	0	0
71	ELMER KARYA SEJAHTERA	0	0
72	EPID MENARA ASSETCO	0	0
73	ERINAKA PERDANA	0	1
74	EXCEL TECHNO LESTARI	0	0
75	EXINDOKARSA AGUNG	0	0
76	FAST FOOD INDONESIA Tbk.	0	4
77	FEI TEXTILE INDUSTRIES	0	89

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
78	FLAMINDO CARPETAMA	0	0
79	FORINDO MITRA UTAMA	0	0
80	FORTUNA KARYA PERSADA	0	4
81	FUTO CEMERLANG INDUSTRI	0	2
82	GAYA HIDUP MASA KINI	0	5
83	GISTEX	0	87
84	GISTEX CHEWON SYNTHETIC	0	83
85	GLOBAL PANGAN ABADI	0	9
86	GLOBAL TEKNIK AGRONUSA	0	1
87	GOLDEN MAKMUR INDONESIA	0	6
88	GRAHA BARA LESTARI	0	0
89	GRAHA LAYAR PRIMA	0	30
90	GRANADA MITRA BERSAMA	0	0
91	GRIYA PRATAMA (BRATAYUDA)	0	91
92	GUNUNG KECAPI	0	81
93	HAE INDO CHEMICAL	0	1
94	HANDAL INDONESIA MOTOR	0	0
95	HANJIN INSOLE INDONESIA	0	187
96	HANNAH ANGELINA TAMA	0	0
97	HARMONI MITRAJAYA	0	0
98	HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA	4	209
99	HOLISTIC INDONESIA	0	167
100	HS APPAREL	0	0
101	HUAYINI ECONOMIC AND TRADEE INDUSTRY	0	0
102	HUSADA PURWAKARTA	0	5
103	ICL VALVE GLOBAL	0	1
104	ILUVA GRAVURE INDUSTRY	0	8
105	ILUVA INDORECYCLE INDUSTRY	0	16
106	INDACHI PRIMA	0	10
107	INDO HUSADA UTAMA	0	42
108	INDO MINERAL RESEARCH	0	23
109	INDOAGRI DAITOCACAO	0	0
110	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	0	142
111	INDONESIA HWALIN KNITTING	0	0
112	INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM	0	0
113	INDONESIA SIMON	0	8
114	INDONESIA VICTORY GARMENT	0	124
115	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.	0	0
116	INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY,TBK.	0	27
117	INDORAMA POLYCHEM INDONESIA	0	0
118	INDO-RAMA SYNTHETICS	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
119	INDOTAISEI INDAH DEVELOPMENT	0	0
120	INDOWISATA TEJA MAHATAMA	0	0
121	INTERNASIONAL MULTI JAYA LOGAM	0	0
122	INTERNASIONAL MULTI JAYA TEKINDO	0	0
123	JAGAD DUA PUTRA	0	0
124	JAKATIJAYA MEGAH	0	0
125	JANANI BUMI RESOR	0	0
126	JAPFA COMFEED INDONESIA	0	1
127	JAYA BETON INDONESIA	0	5
128	JCO DONUT & COFFEE	0	0
129	JEMINA INTERNATIONAL	0	0
130	JINTER INDONESIA JAYA	0	5
131	JUN INTERNATIONAL INDONESIA	0	0
132	K & I INTERNATIONAL INDONESIA	0	12
133	KARYA MITRA INDORAMA	0	0
134	KARYA SEJAHTERA LESTARI	0	0
135	KENCANA WIRAUTAMA SAKTI	0	5
136	KERETA CEPAT INDONESIA CHINA	0	0
137	KHABAMARA SEMESTA RAYA	0	10
138	KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	0	0
139	KING GLOBAL METALINDO	0	10
140	KINUGAWA INDONESIA	5	0
141	KOIN MULTI STAR	0	0
142	KOIN PRIMA INDONESIA	1	0
143	KOMATSU BANE INDONESIA	0	2
144	KOMELT AIR ENGINEERING	0	0
145	KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES	2	2
146	KRIDA BANGUN PERSADA	0	0
147	KRIDA RAGAM INTEGRA SOLUSI	0	0
148	KYOKUTO INDOMOBIL MANUFACTURING INDONESIA	0	2
149	LAN SENA JAYA	0	0
150	LANCAR WIGUNA SEJAHTERA	0	0
151	LANGKAH HIDUP BARU	0	0
152	LEMBU JANTAN PERKASA	0	3
153	LEONG AYAMSATU PRIMADONA	0	0
154	LIEN MAOYI INDONESIA	2	29
155	LINK NET TBK	0	0
156	LINTAS BENUA LAND	0	0
157	LION METAL WORKS	0	1
158	MAKMUR ABADI VALVE	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
159	MAKO ANUGERAH KREASINDO	0	0
160	MALINDO FEEDMILL	0	0
161	MANDIRI SEJAHTERA SENTRA	0	81
162	MANGLAYANG BERKAH SEJAHTERA	0	0
163	MAS FORTUNA INDUSTRI	0	1
164	MATAHARI PUTRA PRIMA	0	0
165	MATALA REALTY DEVELOPMENT	0	0
166	MAXX COFFEE PRIMA	0	4
167	MEGA DAYA TEKNOLOGI	0	1
168	MEGABOX KARUNIA ABADI	0	3
169	MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA	0	0
170	METRO PEARL INDONESIA	28	2339
171	MILANO DESIGN CONCEPT INDONESIA	2	2
172	MILLENNIUM KNITTING	0	0
173	MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK	0	77
174	MINISO INTERNASIONAL COMPANI	0	0
175	MITRA BEBEK PERSADA	0	0
176	MITRA JAYA SAKTI SENTOSA	0	2
177	MITRA TANGGUH UTAMA	0	0
178	MITRA TATA GEMILANG	0	0
179	MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA	0	26
180	MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA	0	3
181	MOOF INDONESIA	0	0
182	MUKTI MANDIRI LESTARI	0	0
183	MULTI OPTIMAL SENTOSA	0	0
184	MULTI WARNA KARPETINDO AGUNG	0	18
185	MULTIRASA NUSANTARA	0	0
186	MUSTIKA CITRA RASA	0	4
187	MUTIARA INTER BUANA	0	0
188	NAGATA OPTO WORKS INDONESIA	2	9
189	NASINDOSEJAHTERA CEMERLANG	0	3
190	NATIONAL ASSEMBLERS	0	154
191	NAXIS LABEL INDONESIA	0	0
192	NEWARK ENGINEERING INDONESIA	0	7
193	NIAGATAMA KENCANA	0	3
194	NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	0	38
195	NOROO AUTOMOTIVE PAINT INDONESIA	0	0
196	NURAGUNG JAYA	0	0
197	OKAMOTO LOGISTICS NUSANTARA	0	0
198	OLIVE PURWA ABADI	1	100

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
199	ONGPIN JAYA INDONESIA	0	2
200	PANCA BUDI LOGISTINDO	0	0
201	PANENARTA NIAGA PERSADA	0	1
202	PELANGI BUNGA LESTARI	0	0
203	PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL	0	0
204	PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBAN	0	57
205	PENJALINDO NUSANTARA	0	23
206	PERKEBUNAN NUSANTARA I	0	0
207	PERSADA SOKKA TAMA	0	0
208	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	0	0
209	PESONA NATASHA GEMILANG	0	2
210	PESTA PORA ABADI	0	27
211	PLN NUSANTARA POWER	0	0
212	PORI HAERA ABADI	0	2
213	PRABU AGRO MANDIRI	0	91
214	PRESHION ENGPLAS	0	9
215	PRODIA WIDYAHUSADA	0	0
216	PROPERTINDO KREASI UTAMA	0	1
217	PSN ENAM INDONESIA	0	0
218	PURINUSA EKAPERSADA	0	0
219	PURNAMA ASIH SUR	0	100
220	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA	0	0
221	PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA PAMOYANAN	0	0
222	PURWAKARTA TELEVISINDO	0	1
223	PUTERA MARWAH BERSAUDARA	0	0
224	PUTRA CITARUM REALTINDO	0	0
225	PUTRA NAGA INDOTAMA	0	0
226	QUTY KARUNIA	0	610
227	RAMAYANA LESTARI SENTOSA	0	0
228	REKSO NASIONAL FOOD	0	0
229	RESKA MULTI USAHA	0	0
230	RESTU MAHKOTA KARYA	0	0
231	RIZKI ANUGRAH MANDIRI	0	0
232	SADANG TERMINAL SQUARE	0	4
233	SAHARA MULTI HIJAU	0	0
234	SALAEURIH MUDA PERKASA	0	0
235	SAMCON	0	4
236	SAMUDRA BUANA TEXINDO	0	6
237	SAMWHA INDONESIA	0	1
238	SANWA MUSEN INDONESIA	0	0
239	SARI BURGER INDONESIA	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
240	SARI COFFEE INDONESIA	0	12
241	SARIMELATI KENCANA	0	0
242	SAYAP MAS UTAMA	0	0
243	SHARIA GREEN LAND	0	4
244	SIDARTA BUMI PRATIWI	0	1
245	SINAR SERVIS INDONESIA	0	1
246	SINAR SUKSES MANDIRI	0	14
247	SINARNIAGA SEJAHTERA	0	0
248	SINGA PURWAKARTA JAYA	0	0
249	SKY FOAM	0	6
250	SOUTH PACIFIC VISCOSE	0	0
251	SRIBOGA MARUGAME INDONESIA	0	0
252	STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	0	62
253	STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI	0	3
254	SUKWANG INDONESIA	0	447
255	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	0	0
256	SUMBER KARJA INTERNASIONAL	0	0
257	SUPER UNGGAS JAYA	0	0
258	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	0	0
259	SURGANYA MOTOR INDONESIA	0	22
260	SURI TANI PEMUKA	0	0
261	TATA GRIYA SARANA	0	0
262	TATA METAL LESTARI	0	2
263	TATALOGAM LESTARI	0	0
264	TEGUH ANINDYAGUNA	0	0
265	TEKNOLOGI MINERAL BATUBARA	0	0
266	TEKSTIL BANGKIT KEMBALI	0	3
267	TEXFIBRE INDONESIA	0	0
268	TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	0	0
269	TIRTAKENCANA TATAWARNA	0	12
270	TITIAN PERSADA	0	1
271	TON HADI	0	304
272	TONG WEI INDONESIA	1	27
273	TOTOKU INDONESIA	0	7
274	TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER	0	0
275	TS TECH INDONESIA	1	0
276	UNIPRES INDONESIA	0	2
277	UNIVANCE INDONESIA	0	31
278	URASE PRIMA	0	4
279	URIMESSING SECURITY GUARD SERVICE	0	0
280	UTAMAYURIM INDAH	0	3

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA	TKI
281	VALEO AC INDONESIA	6	120
282	VELASTO INDONESIA	0	0
283	VIVI JUSTITIA	0	4
284	WARNA JAYA SENTOSA	0	0
285	WARRENTY INDUSTRIES	0	3
286	WASKITA BETON PRECAST Tbk.	0	0
287	WIN TEXTILE	3	45
288	WIRA SANDI	0	3
289	XL AXIATA	0	10
290	YC TEC INDONESIA	10	1605
291	YICHAO TEXTILE INDONESIA	8	21
292	YONTOMO SUKSES ABADI	0	0
293	YUYUN KADARLIA	0	3
294	ZEIN BAHEERA	0	34
295	ZEUS KIMIATAMA INDONESIA	0	23
	JUMLAH	80	10175

Rasio daya serap tenaga kerja

Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja dengan

Jumlah Perusahaan

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Perusahaan

10.175 34,76%

295

REALISASI CAPAIAN KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024

SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN	RENCANA AKSI	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN		KETERANGAN
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
						S/D TW ini	S/D TW ini			
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal										
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100	Persen	142.857.100,00		100,00	142.389.600,00	75,00%	99,67%	Data sistem Perizinan
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	142.857.100	1. Pengembangan Server, aplikasi Gaspol dan Pengembangan Web 2. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal untuk pemenuhan data penilaian (Lap Perizinan, RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	3,00	142.389.600,00	100,00%	99,67%	Laporan Perizinan Berusaha, Pengembangan Sistem Perizinan dan Website, Pengembangan Server

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta,

Hariman Budi Anggoro, ST.MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. H. Yadi Heryadi, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 31 Januari 2025

Pengampu Outcome Program

Dede Fitra Hidayat, S. Pi
NIP. 19800809 200604 1 013

**PERSentase DATA DAN INFORMASI YANG DIMUTAKHIRKAN
TAHUN 2024**

Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1-3jVAwxzyHZsqNvr3Xisq4_yDPoYUIgV

RENCANA AKSI TAHUN 2024



**DPMPTSP
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Veteran No.139 Purwakarta**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Landasan Hukum	7
BAB II. RENCANA AKSI	8
2.1 Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
2.2 Rencana Aksi Tahun 2024	10
BAB III. PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan

data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan revidi hasil evaluasi renja tahun lalu. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Aksi, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Renja;
- b. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dalam dokumen perencanaan;
- c. Aksi kegiatan yang direncanakan memuat waktu pelaksanaan. Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen Renja dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra dan Renja.

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

- a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

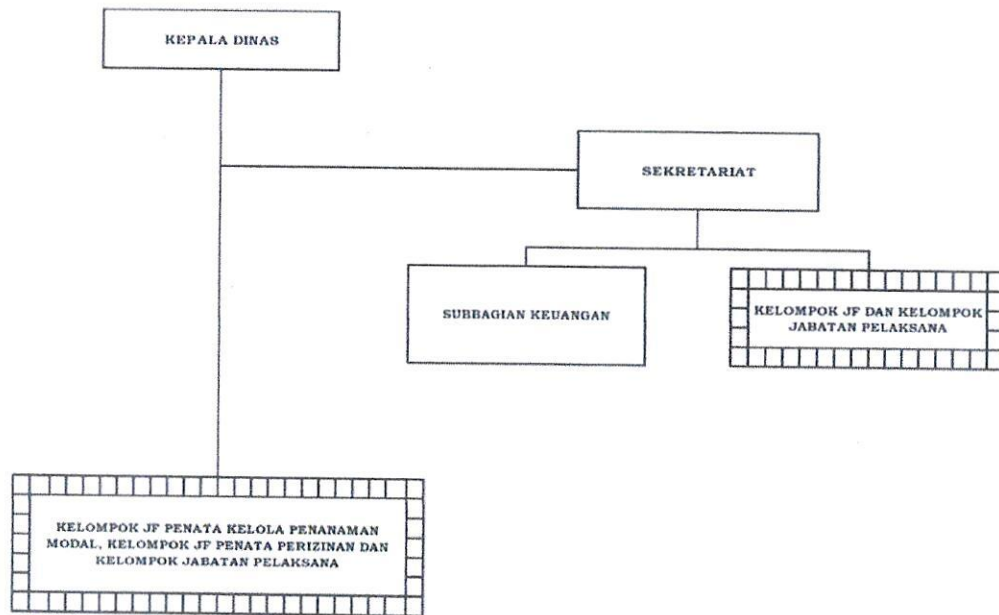
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : DPMPTSP 2022

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DMPTSP sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 83 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Jabatan Struktural	3	3,61
	- Jabatan Fungsional	16	19,28

	- Jabatan Fungsional Pelaksana	24	28,92
2.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	- Pegawai Tidak Tetap	5	6,03
	- Tenaga Harian Lepas	35	42,16
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2023

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana	9	10,85
2.	Sarjana	34	40,97
3.	Diploma IV	2	2,40
4.	Diploma III	2	2,40
5.	SMA	35	42,17
6.	SMP	-	-
7.	SD	1	1,21
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPTSP 2023

Tabel 1.3

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan tahun 2023

NO	GOLONGAN	a	b	c	d	e	JML	%
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	-	11	-	12	27,91
3.	Golongan III	6	4	1	13	-	24	55,82
4.	Golongan IV	7		-	-	-	7	16,27
JUMLAH							43	100%

Sumber : DPMPTSP 2023

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	45	54,22
2.	Perempuan	38	45,78
JUMLAH		83	100%

Sumber : DPMPPTSP 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta per triwulan;
- b. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

1.4 LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan tujuan/sasaran strategis jangka menengah. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 8 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah Sangat Baik;
2. Nilai SAKIP dengan target kinerja pada tahun 2024 adalah AA.

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8 Triliun
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Nilai SAKIP	AA

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, maka terdapat 6 (enam) Program yang mendukung sasaran strategis dan sasaran operasional.

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 110.116.509	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 177.500.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 135.000.000	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 585.147.000	DAK NF
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 120.000.000	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.108.837.852	APBD

2.2 RENCANA AKSI TAHUN 2024

Rencana Aksi Tahun 2024 merupakan aktualisasi dari program dan kegiatan sehingga akan selaras dengan Rencana Kerja Tahun 2024, dengan demikian pencapaian rencana aksi akan ikut menyokong pencapaian pembangunan daerah. Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2024 ini adalah upaya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, rencana aksi tahun 2024 terangkum dalam :

1. Anvesta (Anugerah Investasi Purwakarta)

Merupakan Bentuk Apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap pelaku usaha dalam hal realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, kepatuhan perizinan, kepatuhan penyampaian LKPM, keberlanjutan usaha, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari Keberadaan Perusahaan.

2. UMK Naik Kelas / Kemitraan

Fasilitasi kemitraan antara UMK dengan Perusahaan Besar (*matchmaking*). Kemitraan ini bertujuan agar UMK di Kabupaten Purwakarta dapat menembus rantai produksi global, dan meningkatkan usaha UMK menjadi lebih kompetitif, sehingga UMK dapat “naik kelas”.

3. Purwakarta *Investment Project Ready To Offer*

Penggalian Potensi dan Penyusunan dokumen peluang proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor, *market sounding* serta pemantauan/pengawasan rencana proyek investasi

4. Pembentukan Tim Peningkatan Investasi Daerah

Pembentukan Tim dari lintas dinas instansi yang berkaitan dengan investasi, Berfokus pada strategi promosi dalam meningkatkan realisasi investasi dari berbagai sektor.

5. SILAPAK PRESTASI

Pengembangan *LAPAK PRESTASI* yang bersifat *offline*, dituangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mengkolaborasikan promosi investasi, perdagangan, jasa dan pariwisata dengan promosi inovasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Purwakarta (<https://silapakprestasi-dpmpptsp.purwakartakab.go.id/>).

6. KOSMIK

Kompetisi sinematografi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purwakarta (makanan, minuman, kriya, pakaian, pariwisata dsb).

7. MPP Madukara, Teras Madukara dan Pojok Madukara.

Tempat pendampingan pelayanan publik yang dapat melayani masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, administrasi kependudukan, sidang online Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, pelayanan Taspen dan pelayanan keimigrasian dan pelayanan publik lainnya.

8. Pepeling NIB (Pelayanan Perizinan Keliling)

Kegiatan ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) baik perorangan maupun badan usaha. Seiring dengan

arahan dari Presiden melalui Kementerian Investasi / BKPM RI, maka potensi dari pelaku usaha mikro kecil ini menjadi penopang perekonomian nasional dan juga regional. Di Jawa Barat sendiri, diperkirakan terdapat pelaku UMK dimana sebagian besar melakukan usaha tanpa legalisasi (tidak berizin). Beberapa keuntungan dengan adanya NIB ini antara lain tercatat sebagai pelaku usaha yang legal sehingga dapat memberikan gambaran data dan informasi mengenai usaha seperti jumlah tenaga kerja, asset dan laporan keuangan yang kemudian akan memudahkan UMK ini untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar. Selain itu, NIB juga merupakan prasyarat untuk mendapatkan sertifikasi halal yang juga akan difasilitasi oleh DPMPTSP berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan dengan banyaknya pelaku usaha UMK yang legal akan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purwakarta.

9. GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan *Online*)

Pemanfaatan OSS RBA dalam pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan banyaknya perizinan berusaha maupun non berusaha belum diakomodir dalam aplikasi OSS RBA. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta membuat suatu sistem aplikasi sendiri sebagai inovasi dalam

peningkatan pelayanan perizinan.

10. MPP Digital (Mall Pelayanan Publik Digital)

Instruksi Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP). Walaupun begitu, Aplikasi MPP Digital sebagai Digitalisasi Fungsi Mall Pelayanan Publik dalam rangka percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. MPP Digital Provinsi Jawa Barat juga bukan menjadi suatu substitusi tetapi merupakan komplementer dari MPP Fisik yang telah ada.

11. Forum Penyelesaian Masalah

Merupakan forum yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian permasalahan penanaman modal bagi investor yang mempunyai permasalahan.

12. Pengawasan dan BESTIE LKPM (Bimbingan, Edukasi, Supervisi, Trust, Identifikasi dan Eksekusi LKPM).

Pelayanan menyeluruh terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Menyediakan juga layanan “jemput bola” pengisian LKPM pada periode pelaporan maksimal untuk 10 perusahaan di suatu tempat secara bersamaan.

13. Penguatan RB-ZI

Penguatan Kelembagaan melalui Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, serta melayani secara prima menghasilkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagai satu-satunya Dinas di Purwakarta yang meraih predikat tersebut. Tahun 2024 merupakan langkah awal menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara rinci target rencana aksi Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pertriwulan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.:

TABEL RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LANGKAH AKSI	ANGGARAN	Target Pelaksanaan Per Triwulan			
								I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	02.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8 T		1.127.763.509				
		02.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal				110.116.509				
		2.18.02.2.01	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		40.116.509				
		2.18.02.2.01.0001	Subkegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal	20.000.000	V			

	2.18.02.2.01.0004	Subkegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Kegiatan Usaha	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terkena harmonisasi	20.116.509			√
	2.18.02.2.02	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen		70.000.000			
	2.18.02.2.02.0001	Subkegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Naskah Akademis RUPM 2025-2030	50.000.000			√
	2.18.02.2.02.0004	Subkegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha / Purwakarta Investment Project Ready To Offer (IPRO)	20.000.000	√	√	√
	02.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal				177.500.000			
	2.18.03.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen					
	2.18.03.2.01.0002	Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Promotion 2. Kosmik /Videografi Promosi Investasi 3. UMK Naik Kelas/Kemitraan 4. Anvesta	127.500.000	√		√

	2.18.03.2.01.0003	Subkegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Tim Peningkatan Investasi Daerah	50.000.000	√	
	02.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal				135.000.000		
	2.18.04.2.01	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan		135.000.000		
	2.18.04.2.01.0005	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan Usaha	Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat	0		
	2.18.04.2.01.0006	Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	85.000.000	√	√

		2.18.04.2.01.0007	Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	20.000.000	✓	✓	✓	✓	✓
		2.18.04.2.01.0008	Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000	✓	✓	✓	✓	✓
		02.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				585.147.000					
		2.18.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		585.147.000					
		2.18.05.2.01.0004	Subkegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitas Penyelesaian Masalah dan Hambatan	87.771.000	✓				

		2.18.05.2.01.0005	Subkegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	351 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)	321.832.000	✓	✓
		2.18.05.2.01.0006	Subkegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha ; serta Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	175.544.000	✓	✓
		02.18.06	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				120.000.000		
		2.18.06.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		120.000.000		

		2.18.06.2.01.01	Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengembangan aplikasi Gaspol dan Pengembangan MPP Digital 2. SILAPAK PRESTASI 3. Pengolahan data, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja PTSP, MPP)	120.000.000	√	√
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	02.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat	A, Sangat Baik		13.108.837.852		
		2.18.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen		43.334.000		
		2.18.01.2.01.01	Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		15.017.000	√	√
		2.18.01.2.01.06	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		8.141.000	√	
		2.18.01.2.01.07	Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		20.176.000	√	√

	2.18.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan		7.512.754.415				
	2.18.01.2.02.01	Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan		7.492.759.615	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.02.05	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		9.993.900	✓			
	2.18.01.2.02.07	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan		10.000.900	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		20.000.000				
	2.18.01.2.03.05	Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		20.000.000	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		207.500.000				

		2.18.01.2.05.02	Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		65.000.000	✓	✓	
		2.18.01.2.05.09	Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		142.500.000	✓	✓	✓
		2.18.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan		696.129.303			
		2.18.01.2.06.01	Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		50.000.000	✓		
		2.18.01.2.06.03	Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		30.500.000	✓		
		2.18.01.2.06.04	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		270.625.303	✓	✓	✓
		2.18.01.2.06.05	Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		125.004.000	✓	✓	✓
		2.18.01.2.06.06	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket		5.000.000	✓	✓	✓
		2.18.01.2.06.08	Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan		20.000.000	✓	✓	✓

	2.18.01.2.06.09	Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		170.000.000	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.06.10	Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		25.000.000	✓			
	2.18.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan		851.000.000				
	2.18.01.2.07.05	Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit		51.000.000		✓		
	2.18.01.2.07.06	Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit		800.000.000		✓		
	2.18.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		3.053.160.134				
	2.18.01.2.08.01	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		10.000.000	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.08.02	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		600.000.070	✓	✓	✓	✓
	2.18.01.2.08.04	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		2.443.160.064	✓	✓	✓	✓

	2.18.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan		724.960.000			
	2.18.01.2.09.01	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		110.000.000	√	√	√
	2.18.01.2.09.05	Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		20.000.000	√	√	√
	2.18.01.2.09.06	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit		95.000.000	√	√	√
	2.18.01.2.09.09	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		400.000.000	√		
	2.18.01.2.09.10	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		99.960.000		√	

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPD 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 (RKPD).

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan rencana kegiatan yang langsung menghasilkan output. Maka dengan mempedomani Rencana Aksi Tahun 2024 ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pegawai

yang disertai pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

TUJUAN	SASARAN	SATUAN		INDIKATOR	PIMPINAN UNIT KERJA
Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan kualitas pelayanan informasi penanaman modal	8	Triliun	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	KEPALA DPMPTSP

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	NAMA PROGRAM	Pengampu Outcome
Meningkatnya iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Person	5,6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Arif Martanto, ST, MT
	Jumlah nilai investasi berbasis nasional (PMDN/PMA)	Trilya a Rp.	6,73	
	Jumlah investor berbasis nasional (PMDN/PMA)	Invest or	730	
	Kualitas / pelayanan Realisasi PMDN/imbuhan rasial	Person	28,5	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	NAMA PROGRAM	Pengampu Outcome
Meningkatnya minat Pelaku Usaha untuk Memasukkan Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diadakan	Kegiatan	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Arif Martanto, ST, MT
	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun Rp)	Trilyun Rp	7,4	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	NAMA PROGRAM	Pengampu Outcome
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimalisir Secara Berhak	Person	7,1	PENGEDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	NAMA PROGRAM	Pengampu Outcome
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Rasio daya serap setiap hari	Person	18,50	PELAYANAN PENANAMAN MODAL Metta Ratna Mustika, SE
	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Ditinjau	Person	94,88	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92,50	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	NAMA PROGRAM	Pengampu Outcome
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Person	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Dede Fitra Sarip Hidayat, S. Pi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya kegiatan hukum terkait fasilitasi dan kemudahan berusaha di daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	Arif Martanto, ST, MT
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terwujudnya Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya harmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya harmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Terlaksananya Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Regulasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan	Person	100	Lingga Kurniana, S. Pi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya pemanfaatan informasi peluang investasi	Jumlah Dokumen Penelitian Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	Arif Martanto, ST, MT
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terwujudnya Naskah Akademik RUPM 2025-2030	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Terwujudnya Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Fasilitasi Kemitraan dan IPRO yang terwujud	Jumlah Proposal IPRO	Perusahaan	24	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya minat investasi	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Terwujudnya Dokumen Strategi Promosi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Arif Martanto, ST, MT
Fasilitasi Kemitraan dan IPRO yang terwujud	Jumlah Perwujudan Besar Yang bernilai dengan UMEM	Proposal	6	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang terkendali dalam perizinan berurusan penanaman modal	Person	100	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terlaksananya penyediaan pelayanan perizinan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	12	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	351	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
Terlaksananya kegiatan pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Didukung dan Diversifikasi Data, Profit dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	22	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
Terlaksananya Pengadaan MPP sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Pengadaan Penanaman Modal	Laporan	4	Badrul Heri Lukman Yusuf, SH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Person	100	Metta Ratna Mustika, SE
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	Metta Ratna Mustika, SE
Terlaksananya Penyediaan dan Penghasilan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	50	Metta Ratna Mustika, SE
Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan usaha	200	Metta Ratna Mustika, SE
Terlaksananya Pelayanan di MPP sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Temas Yang diterapkan Standar Pelayanan	Sangat Baik	Tim Pengada Mal Pelayanan Publik	Drs. Irhas Hakeem, M. H.
Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan SKM untuk MPP dan PTSP	Laporan	8	H. Setia Amaliah Nur, S. Sos
Meningkatnya Kinerja PTSP dan PFB	Persentase Nilai Kinerja PTSP dan PFB	Sangat Baik	86	Octiviani Rukhyanti, S.ST, M.Tr.A. P
Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal sesuai Standar Pelayanan	Persentase pelaksanaan pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan	Person	100	Tim Front Office
Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisis, dievaluasi, dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor	Person	100	Octiviani Rukhyanti, S.ST, M.Tr.A.P
Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Gera Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang dilayani	Person	100	Rong Dab Komariah, S.PI, M. Si
Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisis, dievaluasi, dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor	Person	100	Tim Teknis Sektor Kemitraan, Gizi dan Makanan
Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Sektor	Persentase kegiatan usaha yang dipantau, dianalisis, dievaluasi, dan dilaporkan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan sesuai Sektor	Person	100	H. Risa Fajar Pangraman, S. Sos

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA KEGIATAN	PIMPINAN UNIT KERJA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Dede Fitra Sarip Hidayat, S. Pi
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	NAMA SUB KEGIATAN	KETUA TIM
Terlaksananya Penghasilan Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dihaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	Dede Fitra Sarip Hidayat, S. Pi
Terlaksananya Media Sosial, Web dan Sistem Informasi DPMPTSP	Persentase Media Sosial, Web dan Sistem Informasi DPMPTSP yang terkelola	Person	100	Arif Martanto, ST, MT
Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	(Sangat Tinggi)	90	Metta Ratna Mustika, SE
Terlaksananya MPP Digital	Jumlah Temas Yang Dapat Diakses	Temas	20	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
Terlaksananya Inovasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan	Inovasi	8	Kunto Adje Wibowo, Sp. M.Tr.A.P
Terlaksananya pemantauan dan alih media arsip	Jumlah arsip yang digitalisasi	Dokumen	600	Dede Fitra Sarip Hidayat, S. Pi
Terlaksananya pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	Laporan	12	Ismi Adhikah Winandar, SE
Terlaksananya Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Jumlah Pelayanan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Laporan	4	Rian Erviandi, ST

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013